

# INDONESIA “MERDEKA” DARI KORUPSI: Quo Vadis Reformasi Pemberantasan Korupsi

**Dr. Bambang Widjojanto**  
Dosen Paska Sarjana Universitas Djuanda



# PEMBUKAAN UUD 1945

## ALENIA KE- IV, UUD RI 1945

“..... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia  
.....”

# FAKTA KORUPSI



- Detik waktu terus berjalan, Reformasi nyaris berusia 25 tahun & Proklamasi Kemerdekaan sudah 78 tahun tapi KORUPSI terus berdetak menyerbu labirin & kehidupan sosial.
- Tujuan pembentukan Republik Indonesia, yaitu: mencerdakan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan & kesejahteraan sosial seolah “dikoyak” dan “didelegitimasi” oleh frasa kata “KORUPSI”
- Ada begitu banyak diskusi & lokakarya, program & Upaya pengungkapan & penanganan korupsi oleh penegak hukum terus dilakukan tapi tak pernah bisa menghentikan reproduksi kejahatan korupsi.
- Modus operandinya yang kian canggih & sistematis, subyek pelakunya, *highest ranking officials*, dan mereka, sebagiannya, berada di pusat struktur kekuasaan,
- Obyek korupsi hampir menyeluruh di sumber daya yang berada pada “sekalian alam” & sendi kehidupan.

# KORUPSI BERDASARKAN PROFESI

NO	JABATAN	2004	2005	2006	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	JUMLAH
1	Anggota DPR dan DPRD				27	5	16	8	9	19	23	20	103	10	22	29	35	343
2	Kepala Lembaga/Kementerian		1	1	2		1	4	9	3	2		1	2	4	1	2	35
3	Duta Besar				1													4
4	Komisioner		3	2											1			8
5	Gubernur	1		2	1			2	3	3	1	1	2	1		1	1	23
6	Walikota/Bupati dan Wakil			3	4	3	3	3	12	4	9	13	30	18	8	13	15	155
7	Eselon I, II, III dan IV	2	9	15	12	15	8	6	2	7	10	43	24	26	18	20	47	310
8	Hakim				1	2	2	3	2	3	1	3	5			1	6	29
9	Jaksa					2					3	1		3			1	11
10	Polisi						1	1								1	1	4
11	Pengacara		2		1					2	2		4	1		1	3	16
12	Swasta	1	4	5	8	10	16	24	16	18	26	28	56	59	31	18	27	373
13	Lain-lain		4	1	8	1	2	8	8	3	21	13	31	33	20	28	10	200
14	Korporasi											1	4	1		1	1	8
	JUMLAH	4	23	29	65	38	49	59	61	62	98	123	260	154	104	114	149	1519

60

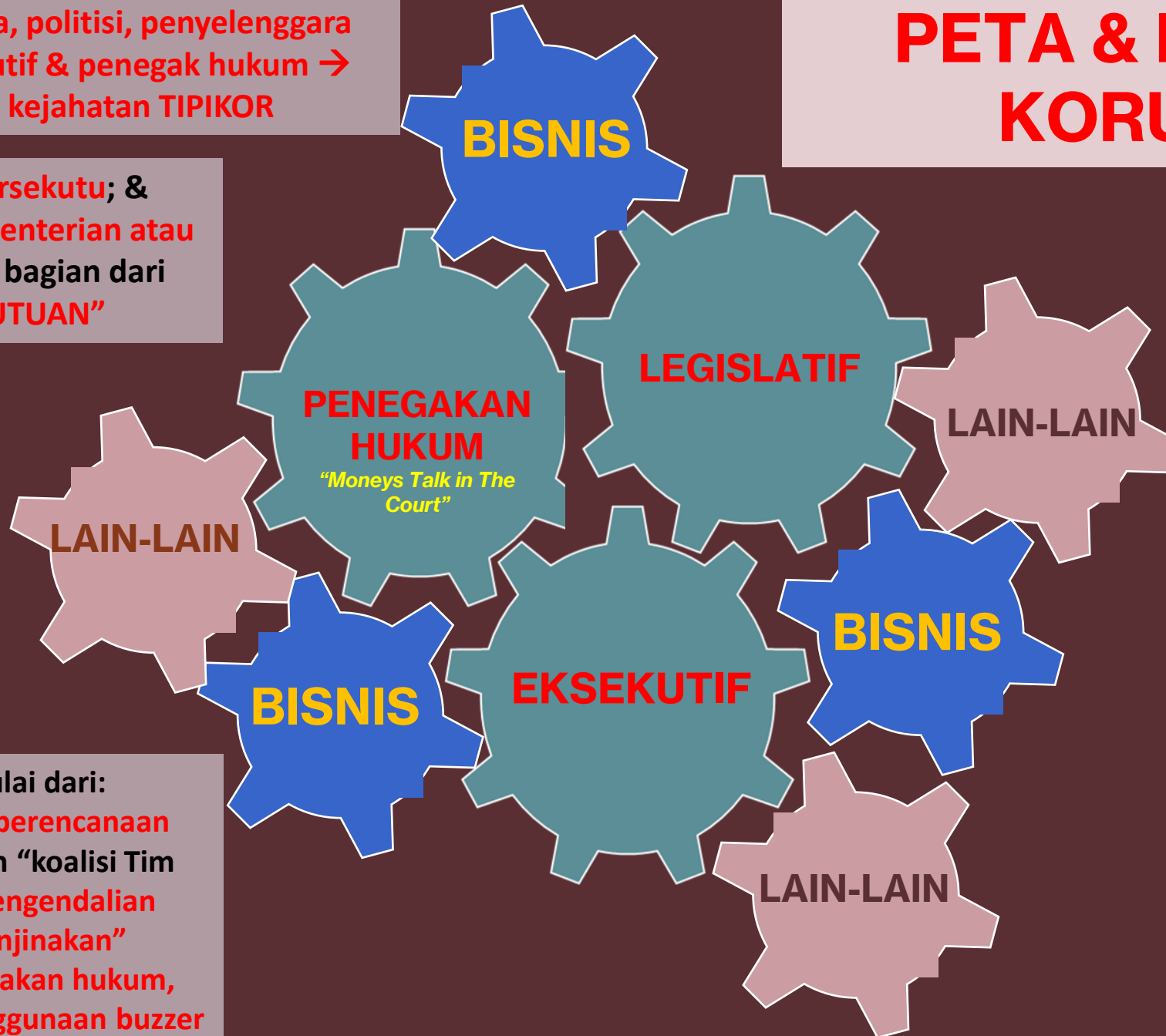
# PETA & MODUS KORUPSI

Kalangan bisnis/swasta, politisi, penyelenggara negara/pejabat eksekutif & penegak hukum → mayoritas pelaku kejahatan TIPIKOR

BISNIS & POLITISI bersekutu; & sebagian Pimpinan Kementerian atau Kepala Daerah → jadi bagian dari "KOALISI PERSEKUTUAN"

Koalisi Persekutuan Kejahatan TIPIKOR ini melakukan:  
TINDAK PENYUAPAN, Perbuatan Melawan Hukum/Menyalahgunakan Kewenangan, Gratifikasi dan Bahkan PEMERASAN

Kejahatan itu dimulai dari:  
pembuatan kebijakan, perencanaan anggaran, pembentukan "koalisi Tim Pelaku Kejahatan", "pengendalian pengawasan" & "penjinakan" oknum/Lembaga penegakan hukum, penggiringan opini & penggunaan buzzer



TIPIKOR KPK Tahun 2004-2022:

Gratifikasi/penyuapan : 904 kasus  
Pengadaan barang/jasa: 277 kasus  
Penyalahgunaan anggaran: 57 kasus  
TPPU : 50 kasus  
Pungutan/pemerasan : 27 kasus  
Perizinan : 25 kasus  
Merintang proses KPK : 11 kasus

# BEBASKAN DARI KORUPSI POLITIK

*Money Politics  
within Election  
Process*

*Akuntabilitas  
Keuangan Partai*

*Trading in Influence*

**Rekrutmen Politik:  
High Cost Politics**

*Conflict of  
Interest*

**Demokratisasi Internal Partai  
(Elit Partai, Kartel & Dinasti)**



# DELEGITIMASI PARLEMEN “MAHAKUASA”: TENDS TO CORRUPT

## UU Omnibus Kesehatan, Disahkan DPR Walau Bermasalah

- Menghilangan pasal tentang *mandatory spending* atau wajib belanja anggaran (Pasal 171 UU No. 36 Tahun 2009)
  - Mengubah Health Care menjadi Health Industri
    - Liberalisasi tenaga kesehatan,
- Mendowngrade kompetensi → surat tanda registrasi (STR) dokter dan perawat seumur hidup,
  - Mendelegitimasi Organisasi Profesi → penghapusan rekomendasi organisasi profesi (OP) dalam penerbitan Surat Izin Praktek, dan
- Menghancurkan Ketahanan Kesehatan Nasional → rawan penyalahgunaan data genomik WNI

### Menko Polhukam, Mahfud MD:

“DPR itu menolak UU tentang pembelanjaan uang tunai, karena mereka katakan terus terang, kalau politik tidak bawa uang tunai nggak bisa katanya,”

### Bambang Pacul, Ketua Fraksi PDIP:

“UU Pembatasan Uang Kartal bisa repotkan DPR/D saat kampanye”

“Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua, Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet. E-walletnya cuman Rp 20 juta lagi. Enggak bisa Pak. Nanti mereka enggak jadi lagi. Loh saya terang-terangan ini,”

“Pembatasan transaksi uang kartal ini sifatnya pencegahan di hulu, kalau perampasan aset di hilir.



# MEMBANGUN POLITIK NIR-KORUPSI

*Money Politics  
within Election  
Process*

*Accountability  
Financial Parties*

*Trading in Influence*

*Political Recruitment:  
High Cost Politics*

*Conflict of  
Interest*

**Internal Democratization Within Party**  
(Elit Partai, Kartel & Dinasti)





# KASUS BTS & PENCUCIAN UANG Rp.349 Triliun



## BISNIS & EKSEKUTIF

1. Proyek BTS 4G 2020-2022  
“ ... penjabaran pelaksanaan dari arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat internal cabinet ...”;
2. Ada tersangka → 7 orang swasta & 1 pejabat negara;
3. Transaksi diduga dilakukan oleh Bisnis & ASN Pajak/Beacukai

## LEGISLATIF & BISNIS

4. Vendor “dimiliki” Pihak punya relasi dengan partai/politisi dr The Ruling Parties;
5. Ada keterlibatan orang partai yang “cawe-cawe” dalam penunjukan vendor;

## BISNIS, LEGISLATIF & YUDIKATIF

6. Ada “Markus” yang mengatur kasus agar tidak diungkap.  
(Ada dugaan keterlibatan Oknum partai/politisi & swasta);
7. Pejabat ASN punya relasi yang baik & kuat dengan Penegak Hukum

# BEBASKAN PENEGAKAN HUKUM DARI KORUPSI

**CONFLICT OF  
INTEREST**

**TRADING IN  
INFLUENCE**

**ILLICIT  
ENRICHMENT**

**ASSETS RECOVERY  
Conviction & Non-Conviction  
Based Asset Forfeiture**

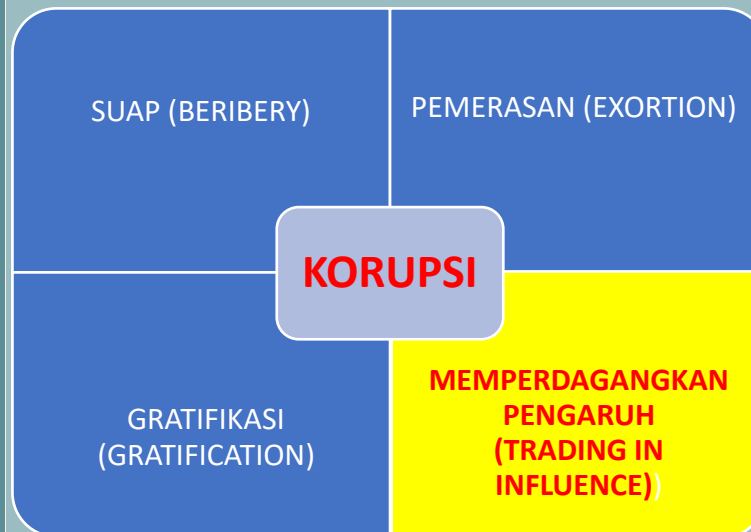
**Embezzlement  
Property & Bribery  
in PRIVATE  
SECTOR**

# CORRUPTION

## CONFLICT OF INTEREST



## TRADING IN INFLUENCE



## ILLICIT ENRICHMENT

**95% LHKPN TAK AKURAT**  
**BANYAK PEJABAT  
SEMBUNYIKAN HARTA**

Dari ribuan laporan harta pejabat negara tersebut **95%** tidak akurat.

Secara umum, banyak harta yang tidak dilaporkan, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain.

**PAHALA NAINGGOLAN**  
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK

Temuan ini membuat KPK akan lebih aktif untuk mengecek ke sejumlah stakeholder.

KPK periksa sebanyak 1.665 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak 2018 sampai 2020.

# MEMBANGUN PENCEGAHAN KORUPSI

## SISTEM INTEGRITAS & AKUNTABILITAS NASIONAL (SIAN)

Integritas & Akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan kinerja dan pelayanan publik yang baik.

SIAN → Mengendalikan konflik kepentingan sehingga keputusannya adil dan mengutamakan kepentingan publik, menerapkan sistem pengawasan internal, menjamin keterbukaan informasi & menjelaskan kebijakan yang dilakukan; serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan mematuhi kode etik serta peraturan yang berlaku.

## SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)

SIN memuat berbagai informasi individu, seperti: informasi diri, data keluarga, kepemilikan aset dan lainnya (KTP, SIM, Paspor, BPJS, NPWP dan data lainnya)

SIN mengakomodir data individu perihal keuangan dan non keuangan.

## FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU)

Tingkatkan kewenangan “penyelidikan” guna memperkuat kualitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan agar berkontribusi dalam optimalisasi pengembalian keuangan negara

RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, khususnya di sektor perekonomian dan keuangan

Pemberantasan Green Financial Crimes (GFC) & Electoral Financial Crimes

# WUJUDKAN PARTISIPASI PUBLIK

## Pasal 5 ayat (1) UNCAC 2003

Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, develop and implement or maintain effective, coordinated anticorruption policies that promote the participation of society and reflect the principles of the rule of law, proper management of public affairs and public property, integrity, transparency and accountability

## Pasal 32 ayat (1) UNCAC 2003

Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.

*“Corruption is paid by the poor”*

*“People’s indifference is the best breeding ground for corruption to grow”*

*People’s Supply Sets of Corruption*

Pasal 41 ayat UU No. 31 Tahun 1999  
“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan & pemberantasan tindak pidana korupsi”.

No.	Hak	Pasal
1.	Mencari, memperoleh dan memberikan informasi dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi	Pasal 41(2)a.
2.	Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi dugaan terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum	Pasal 41(2)b.
3.	Menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum	Pasal 41(2)c.
4.	Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari	Pasal 41(2)d.
5.	Memperoleh perlindungan hukum dalam hal: <ul style="list-style-type: none"><li>- melaksanakan hak sesuai Pasal 41(2)a,b dan c.</li><li>- diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli.</li></ul>	Pasal 41(2)e.

Pasal 42 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999  
Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

A person wearing a blue suit and a patterned tie is holding a white piece of paper. The paper has the Indonesian phrase "TERIMA KASIH" (Thank you) written on it in red, bold, capital letters. The background is dark and out of focus.

“Fighting corruption is not an end in itself. But there is a fight for social justice, for peace and for security.”

**TERIMA KASIH**



ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

# SELAYANG PANDANG ARSIP KORUPSI



**Dharwis W.U. Yacob, S.S., M.Si**

Ketua Tim Pusat Studi Arsip  
Pemberantasan Korupsi dan  
Diorama Sejarah Perjalanan  
Bangsa



# Republik Indonesia - ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia

# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

OLD BUILDING AND  
MEMORABLE OFFICE



Jln. Gajah Mada 111 Jakarta Pusat

NEW BUILDINGS AND NEW SPIRIT



Jl. Ampera Raya No 7 Jakarta Selatan



Pusdiklat kearsipan di Bogor



Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh Bakoy, Aceh Besar



# Gedung Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi



“Apa itu Arsip? ”

—Someone famous



$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$



$$\frac{C^3 + 5CA}{2CA}$$

$$\frac{C - B}{3 - D}$$



Undang-Undang Nomor  
43 Tahun 2009 Tentang  
Kearsipan

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

# “Apa itu Fungsi Arsip?”

—Someone famous



$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

# FUNGSI ARSIP



## 1 DINAMIS

- Nilai guna primer:
- Administrasi
- Keuangan
- Hukum
- IPTEK

## 2 STATIS

- Nilai guna sekunder atau Sejarah: informasional, kebuktian, intrinsik
- Memori Kolektif Bangsa

## MUSNAH

$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

# “Apa itu Arsip Statis?”

—Someone famous



$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

# Pengertian Arsip Statis (UU NO.43 Tahun 2009)

$$C = \frac{B^3 + C^2 + A}{3BA}$$

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh lembaga pencipta arsip, karena mempunyai nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan permanen, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan



# ARSIP STATIS

1.

- Memiliki nilai kesejarahan

2.

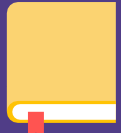
- Telah habis masa retensinya

3.

- Berketerangan dipermanenkan







Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Wknd

# Fungsi Arsip Statis

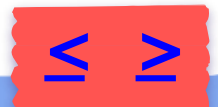


**Memori Kolektif, Identitas dan Jati Diri Bangsa;**

**Bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;**



**Sumber informasi publik.**



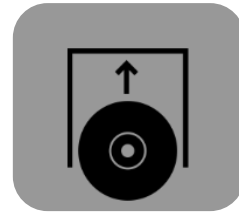
# JUMLAH ARSIP STATIS ANRI

Berdasarkan Media Simpan



Arsip Kertas

30.370,70 Meter linier



Arsip Optical Disc

16.363 keping

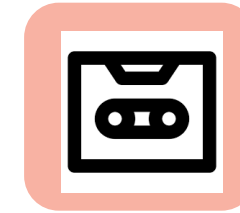
Arsip Optical Disc

16.363 keping



Reel to reel sound

946 reel



Arsip Video

25.774 kaset

Arsip Rekaman suara

54.716 kaset



Arsip Mikrofilm

14.502 roll

Arsip Mikrofiche

14.262 fische



Arsip Poster

336 lembar



Arsip Elektronik

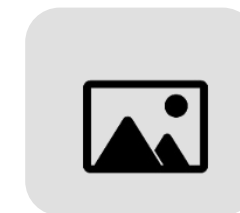
390 Terrabyte

1 Flashdisk



Arsip Kartografi Peta

131.072 lembar



Arsip Foto

3.474.352 lembar



59.035 reel

Arsip Film

# Jumlah Arsip Statis ANRI

Berdasarkan Media Simpan



Arsip Kertas  
30.370,70 Meter linier



# Jumlah Khazanah Arsip Kertas ANRI Berdasarkan Periode Sejarah

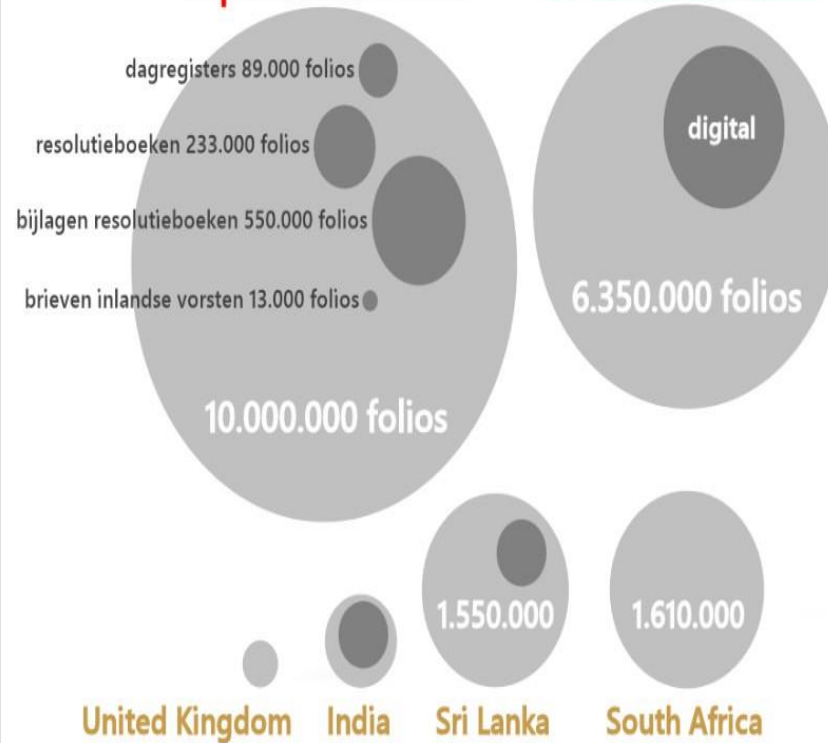
No.	Periode	Tahun	Jumlah
1.	VOC	1602—1800	3.981,67 ML
2.	Hindia Belanda	1800—1811, 1816—1942	16.169,64 ML
3.	Inggris	1812—1816	36,29 ML
4.	Jepang	1942—1945	0,10 ML
5.	RI	1945—sekarang	10.142,00 ML



## VOC archives around the world in size

### Arsip Nasional Republik Indonesia

### National Archives of the Netherlands



# Khazanah Arsip di Arsip Nasional Republik Indonesia

*Pengguna dapat mengecek koleksi arsip melalui website <https://anri.go.id/sekitar-arsip/arsip-statis> dan memilih arsip dari 169 daftar, 147 inventaris, serta 11 guide yang telah tersedia secara daring.*

# Pusat Studi Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia

## Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi

- Lokasi: *Jl. Mampang Prapatan, Buncit Raya, Jakarta Selatan*
- Arsip pemberantasan korupsi di Indonesia sejak masa VOC hingga era kemerdekaan

## Pusat Studi Arsip Kepresidenan

- Lokasi: *Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat*
- Arsip dokumentasi (foto) aktivitas presiden-presiden Republik Indonesia
- Arsip dokumen kenegaraan yang dirilis oleh presiden

## Balai Arsip Statis dan Tsunami (BAST)

- Lokasi: *Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam*
- Arsip pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami



# “Apa Itu Pengelolaan Arsip Statis?”

—Someone famous

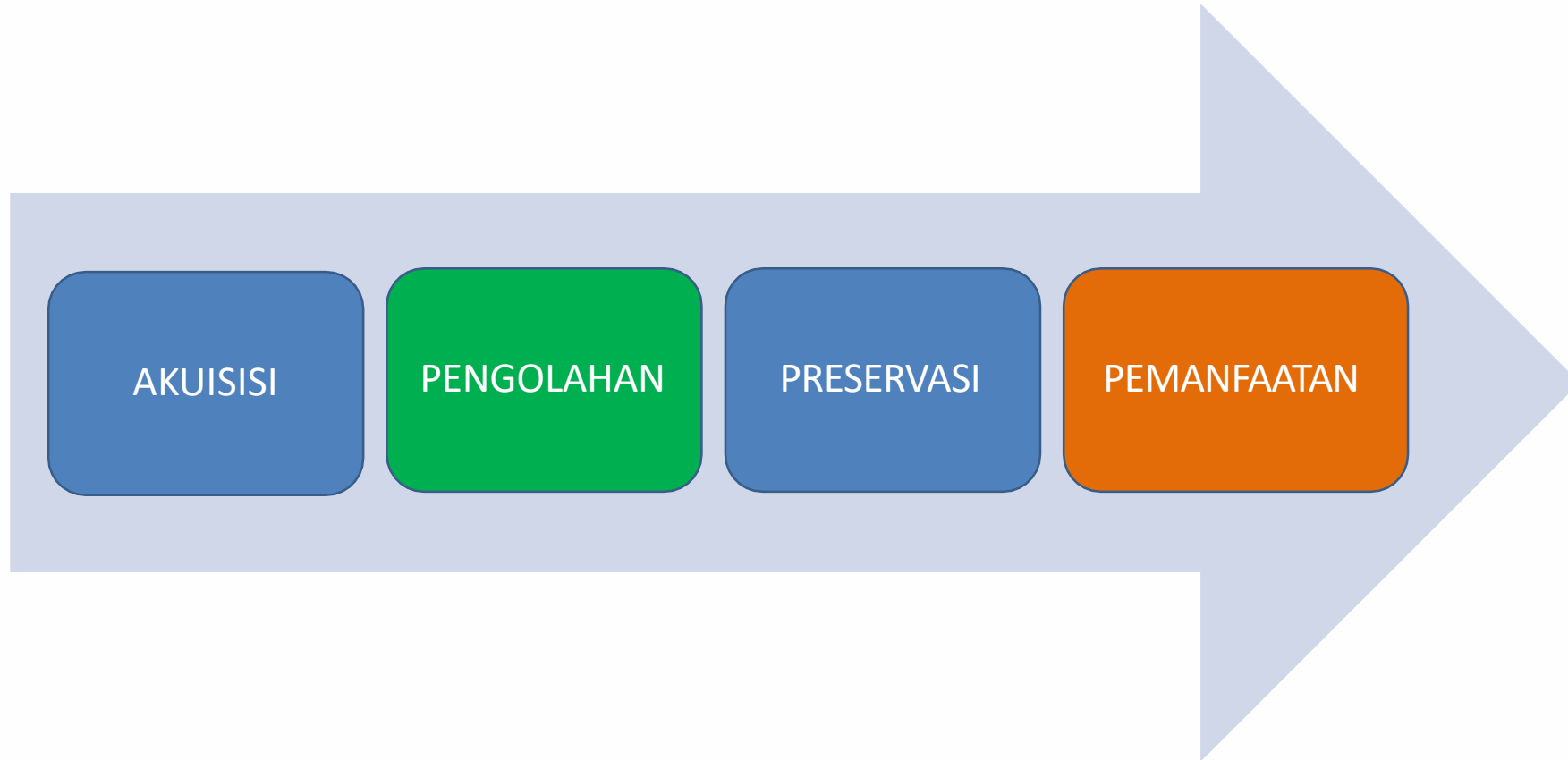


$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

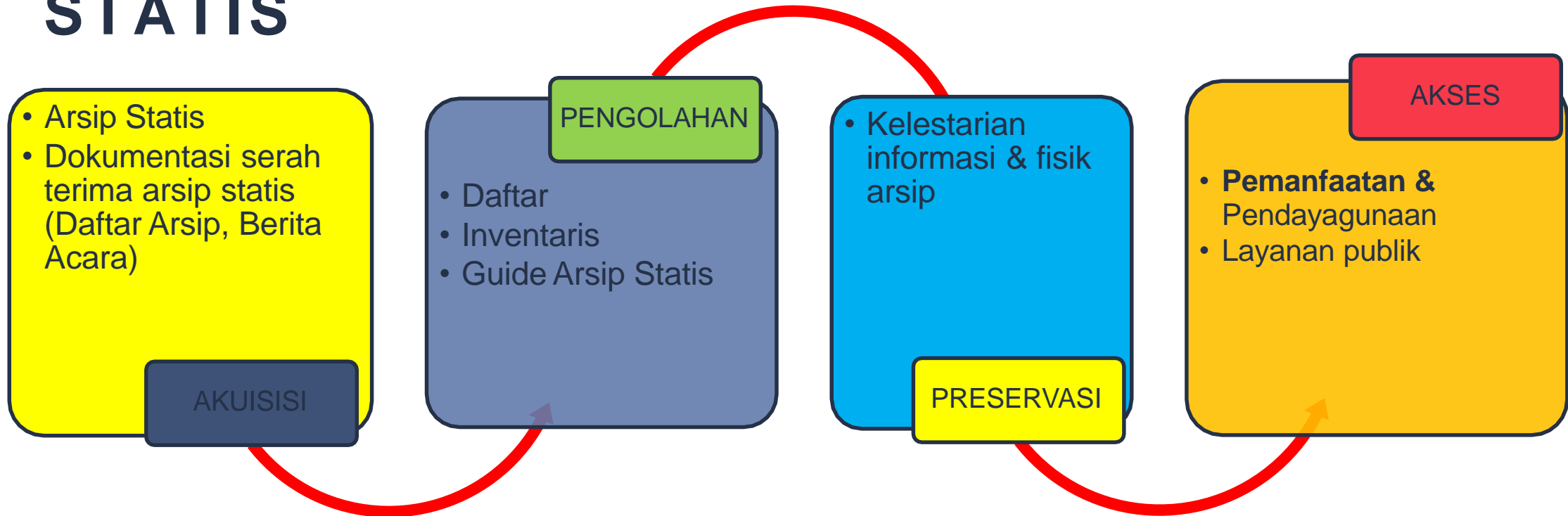
$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$



# PENGELOLAAN ARSIP STATIS



# LINGKUP PENGELOLAAN ARSIP STATIS



# “Khazanah Arsip Korupsi Apa Sajakah yang Ada di ANRI ”

—Someone famous



$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

# KHAZANAH ARSIP KORUPSI DI ANRI



- **VOC**
  - Hoge Regering (Dewan Tinggi)
  - Notariaat (Notaris)
  - Residentie (Pemerintah Lokal)
- **Hindia Belanda**
  - Algemeene Secretarie
  - Algemeene Secretarie Grote Bundel Missive Gouvernment Secretarie
  - Departement van Burgelijke Openbare Werken (BOW)
  - Grote Bundel BOW
  - Departement Verkeer en Waterstaat (Setelah tahun 1934)
  - Departemen van Mijnwezen
  - Departement van Financien
  - Binnenlandsch Bestuur
- **Era Sukarno**
  - Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara 1959-1963
  - Kementerian Pertahanan
  - Kabinet Presiden RI
  - Kabinet Perdana Menteri
  - Kementerian Pekerjaan Umum
- **Era Soeharto**
  - Sekretariat Negara seri Tromol Pos
  - Telkom
- **Era Reformasi**
  - Sekretariat Negara Seri Produk Hukum
  - KPK

# “Contoh Arsip Korupsi di Masa VOC”

—Someone famous



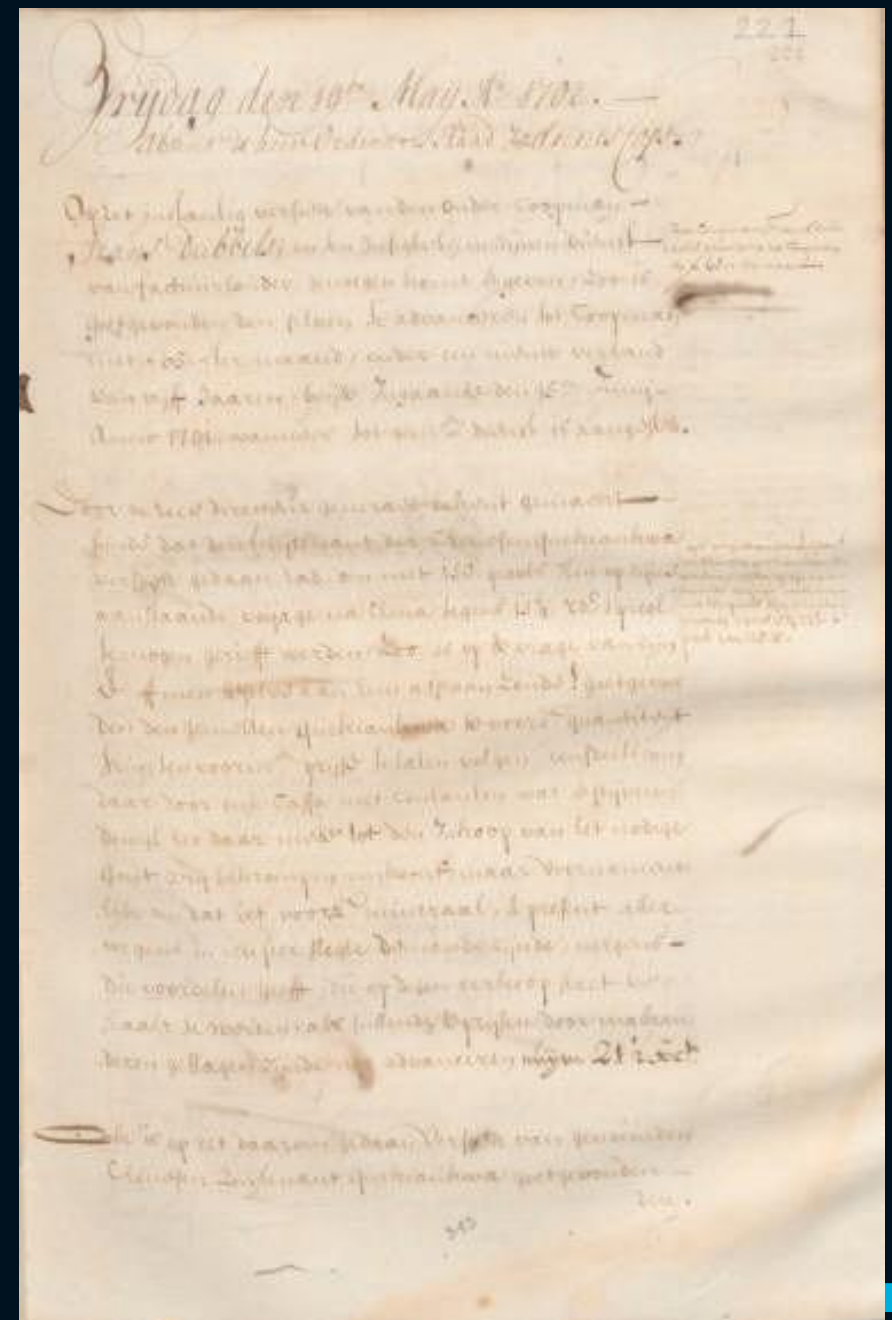
$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

# Korupsi Pada Era VOC

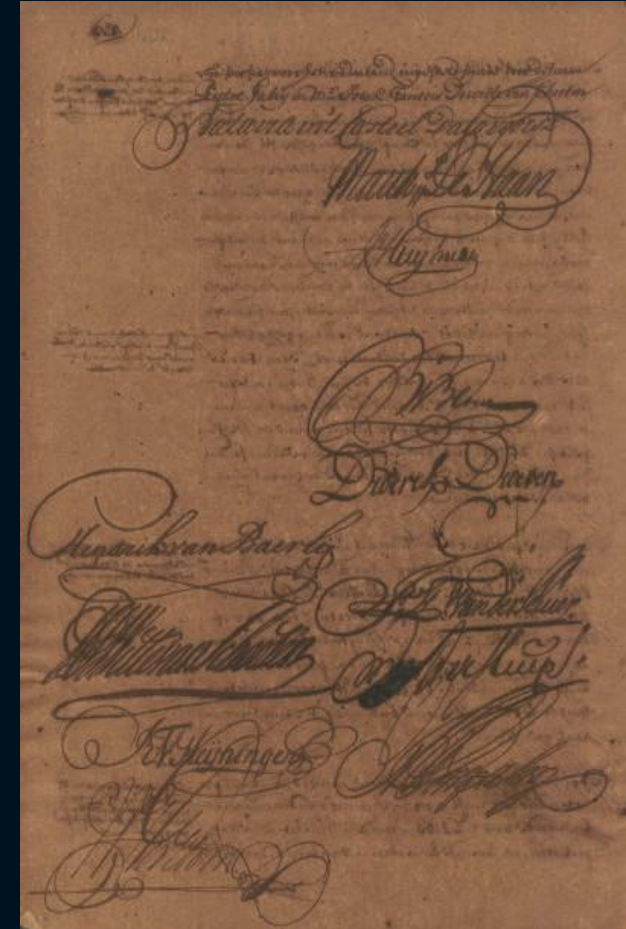
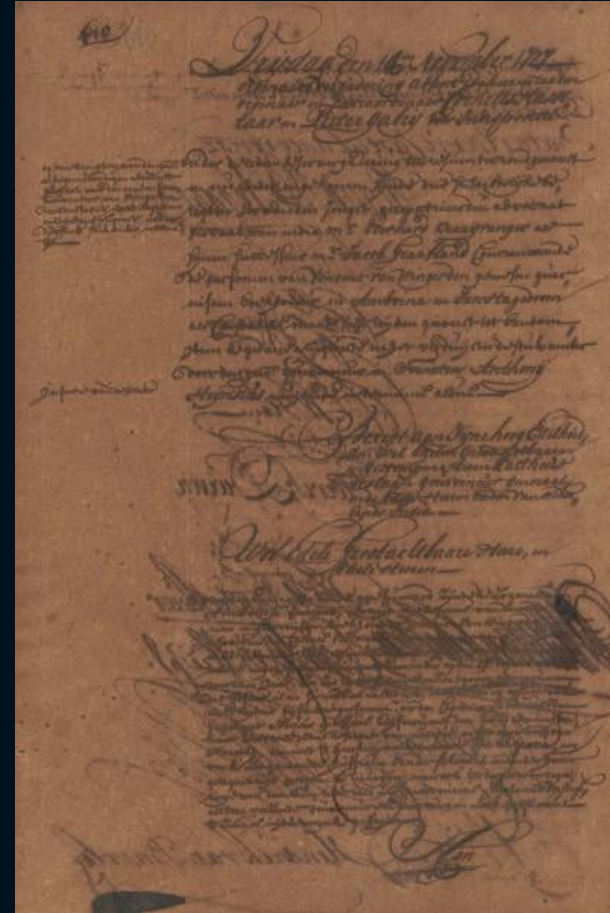
- Hoge Regering No. 918 Folio 221-229 (Bundel Arsip Seri Resolutie kurun waktu 03 Januari 1702 – 29 Desember 1702)
- Pengaduan kepada pengelola gudang perdagangan akibat ditemukannya kecurangan dalam penimbangan lada. 1702

Contoh Arsip



# Korupsi Pada Era VOC

- Hoge Regering No. 957 Folio 610-622
- Laporan dari advocaat fiscaal mengenai penggelapan 2 amberigis, oleh gubernur Hensius, 14 November 1727. Amberigis merupakan salah satu komoditas yang berasal dari ikan paus jenis sperma. Isi perut ikan paus jenis ini dikenal sebagai komoditas premium mahal yang dapat digunakan untuk beberapa hal seperti bahan baku parfum, perasa makanan dan minuman, dan pengobatan.



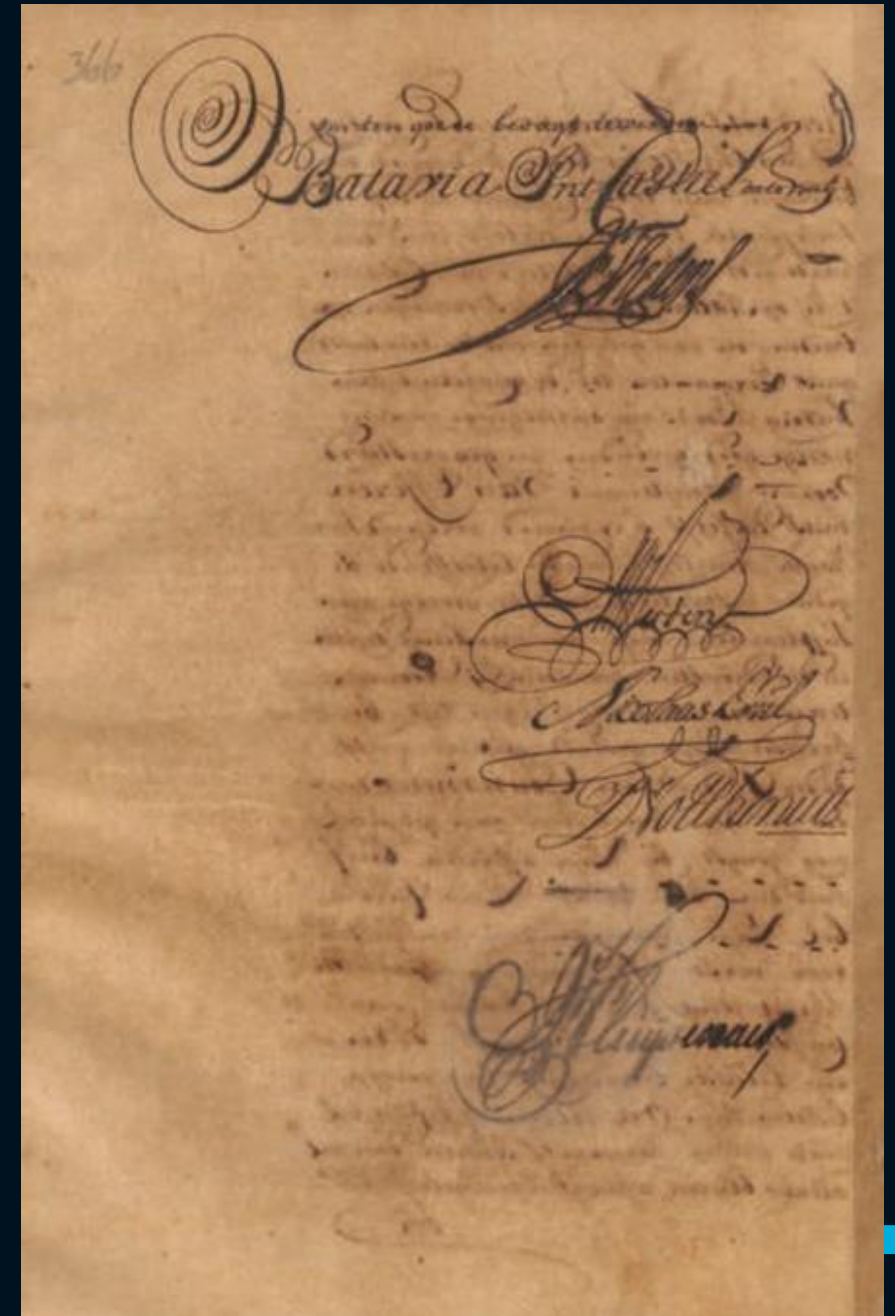
Contoh Arsip



# Korupsi Pada Era VOC

- Hoge Regering No. 998 Folio 355-366 (Bundel Arsip Seri Resolutie 12 Februari 1743)
- Catatan dalam rapat dengan salah satu keputusannya mengenai pemberian hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran korupsi. 12 Februari 1743

Contoh Arsip



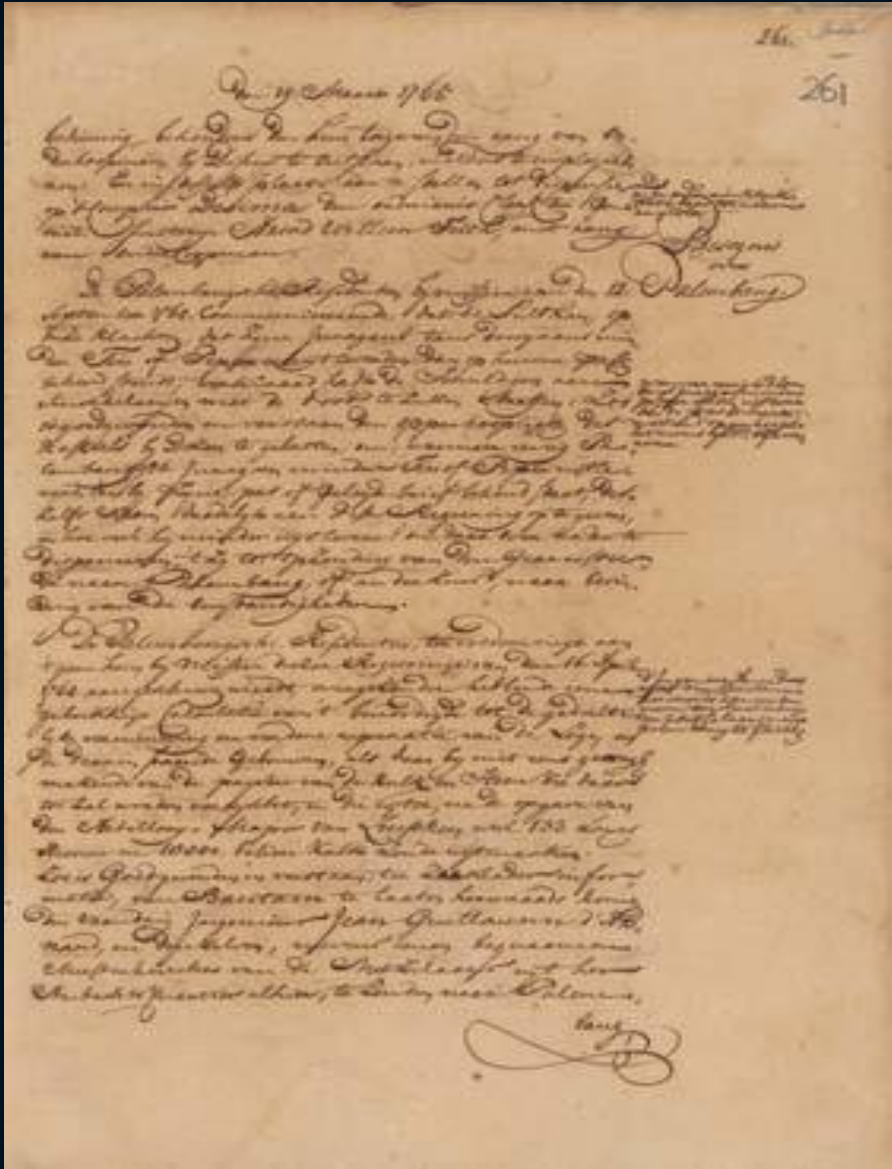


# Korupsi Pada Era VOC

- Hoge Regering No. 1038 folio 261-264 (Bundel Arsip Seri Resolutie 19 Maret 1765)
- Informasi keluhan Residen Palembang terhadap para juragan yang telah mengirimkan lebih sedikit pasokan timah dan lada dari ketentuan yang berlaku. Bagi mereka yang dianggap bertanggung jawab atas adanya penyelundupan tersebut akan menerima hukuman mati. Arsip ini selain melaporkan sebuah kehajatan juga menginformasikan mengenai tindakan pencegahan terhadap kejahatan korupsi dengan hukuman yang berat.



## Contoh Arsip



$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$



# “Contoh Arsip Korupsi di Masa Kolonial Belanda”

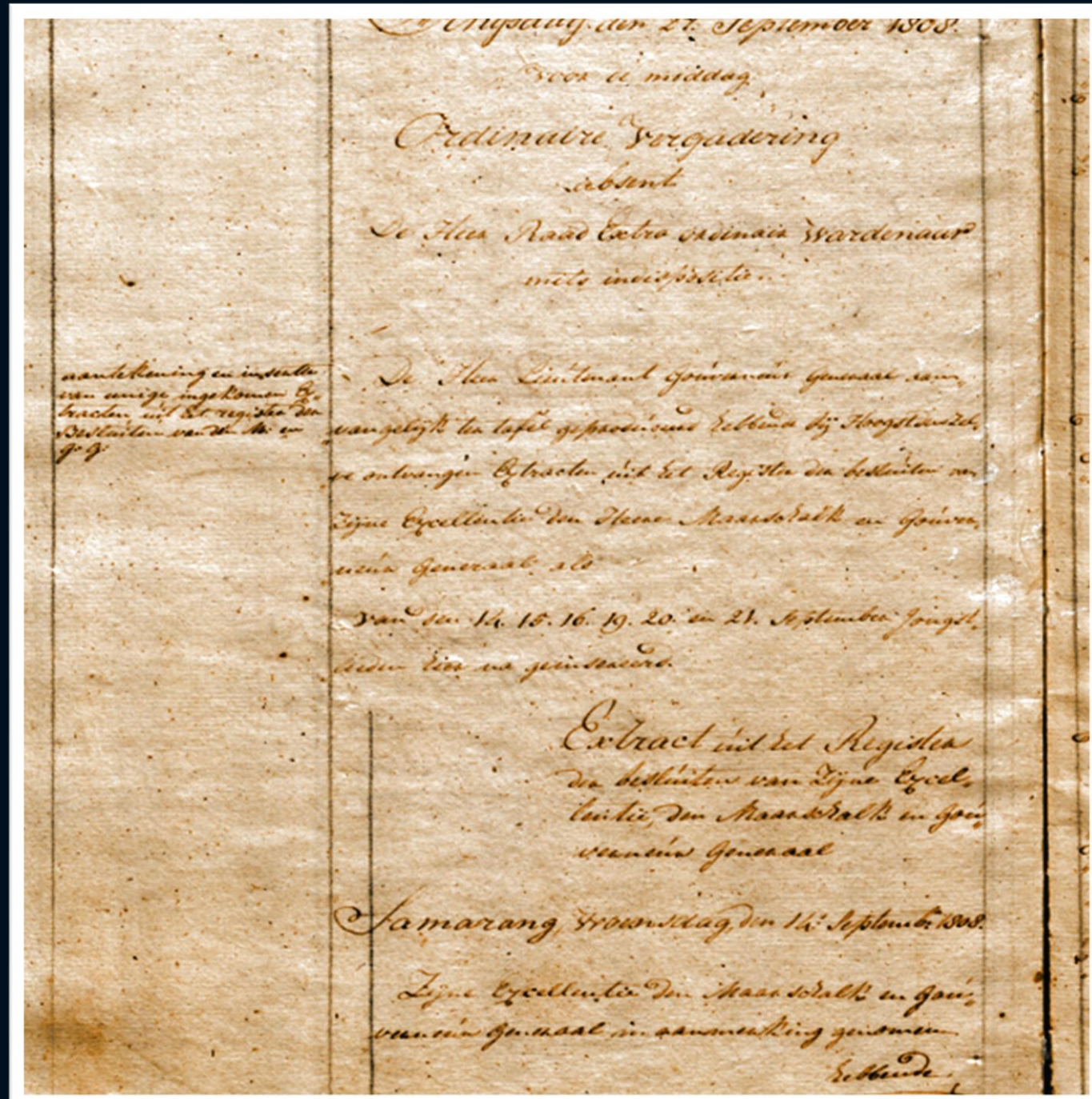
—Someone famous

$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

# Di Era Kolonial Hindia Belanda

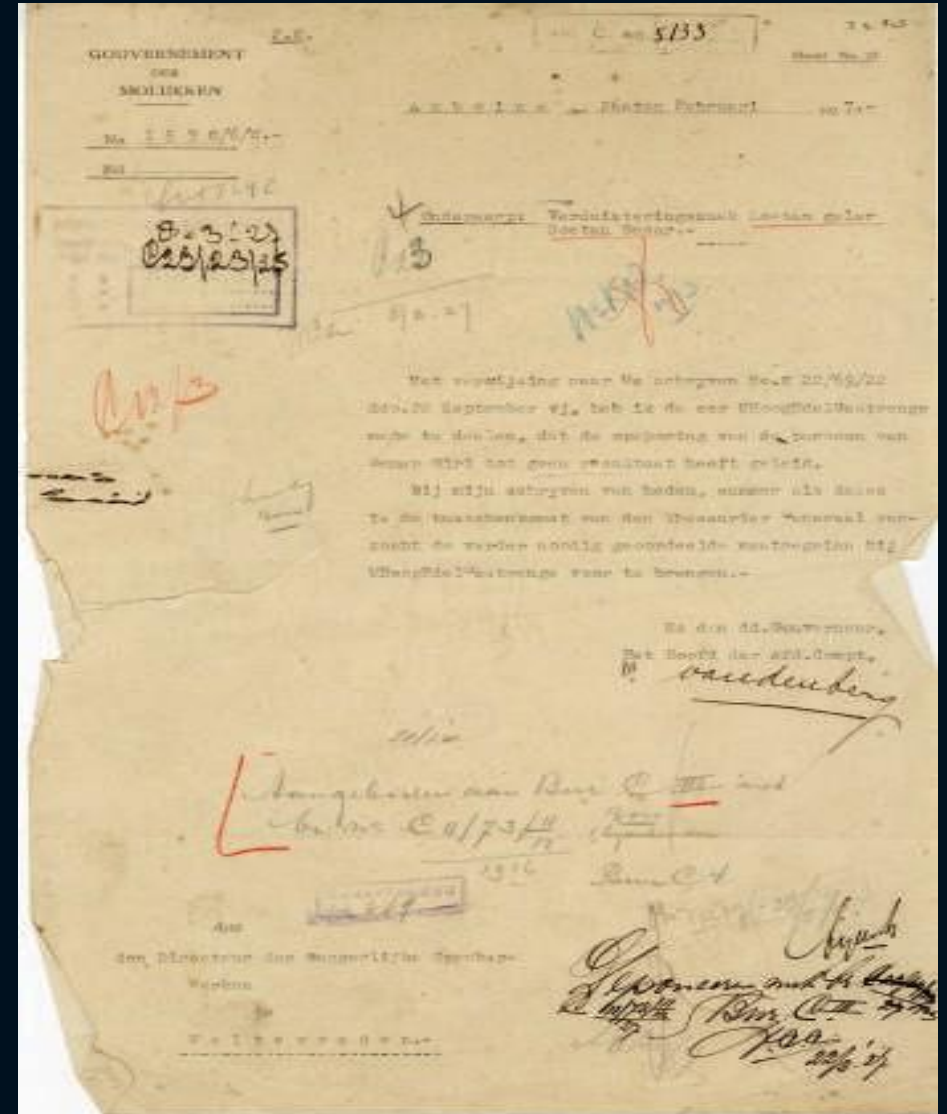
- Hoge Regering Number 1176
- Keputusan (*Resolutie*) Hoge Regering dari H.W. Daendels tanggal 27 September 1808 tentang reorganisasi sistem pemerintahan di Jawa untuk memutus mata rantai korupsi dan kolusi pejabat di wilayah Jawa

Contoh Arsip



# Di Era Kolonial Hindia Belanda

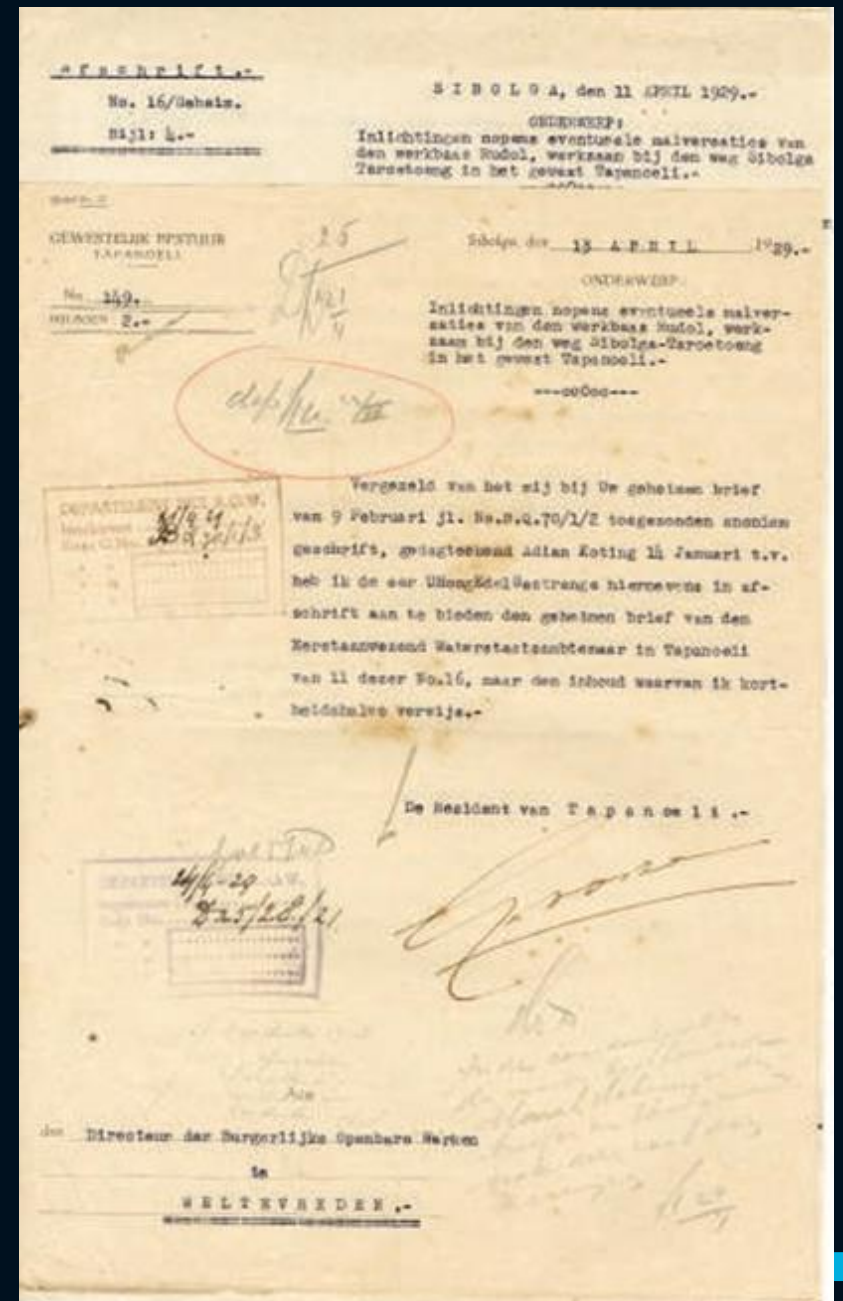
- **Grote Bundel Burgerlijke Openbare Werken No. 5401**
- **Bundel kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Pegawai Burgelijke Openbare Werken Molukken atas nama loetan gelar Soetan Besar. Berkas arsip laporan Algemeene Reken Kamer (Badan Pengawas Keuangan) melaporkan tentang adanya penggelapan uang dari Pegawai Burgelijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum) Molukken (Maluku). 30 September 1926 - 26 Februari 1927.**



# Grote Bundel Burgerlijke Openbare Werken No. 2941

- Berkas dugaan penyalahgunaan keuangan oleh pimpinan proyek pembangunan jalan Sibolga-Taroetoeng di wilayah Tapanoeli atas nama Rudol. Berkas arsip ini berisi antara lain tentang laporan dari dugaan penyalahgunaan keuangan pada Proyek Pembangunan Jalan Sibolga- Taroetoeng di wilayah Tapanoeli, pembelaan Departemen Pekerjaan Umum Residen Tapanoeli, dan laporan lapangan dari Mandor Proyek terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan atas Nama Rudol. 11 April 1929

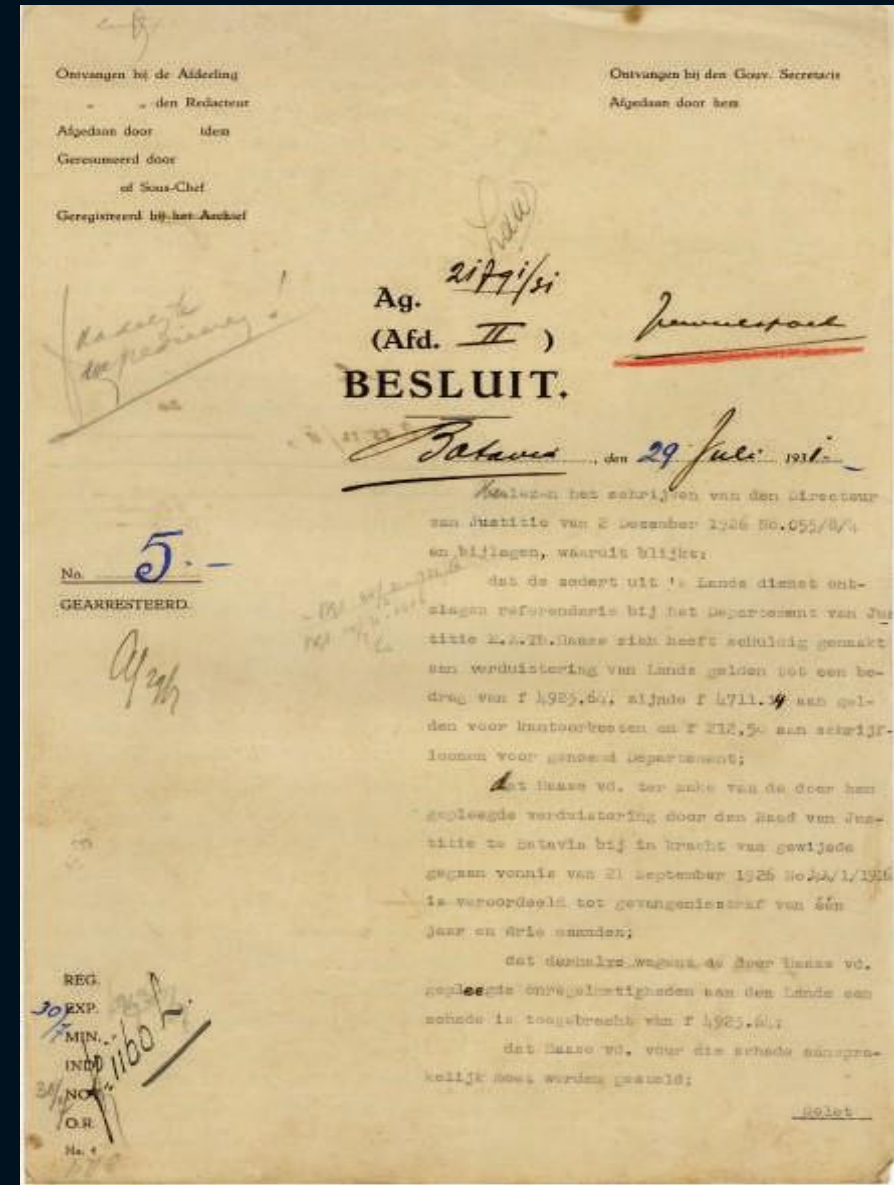
Contoh Arsip



# Algemeene Secretarie Grote Bundel Besluit No. 2797

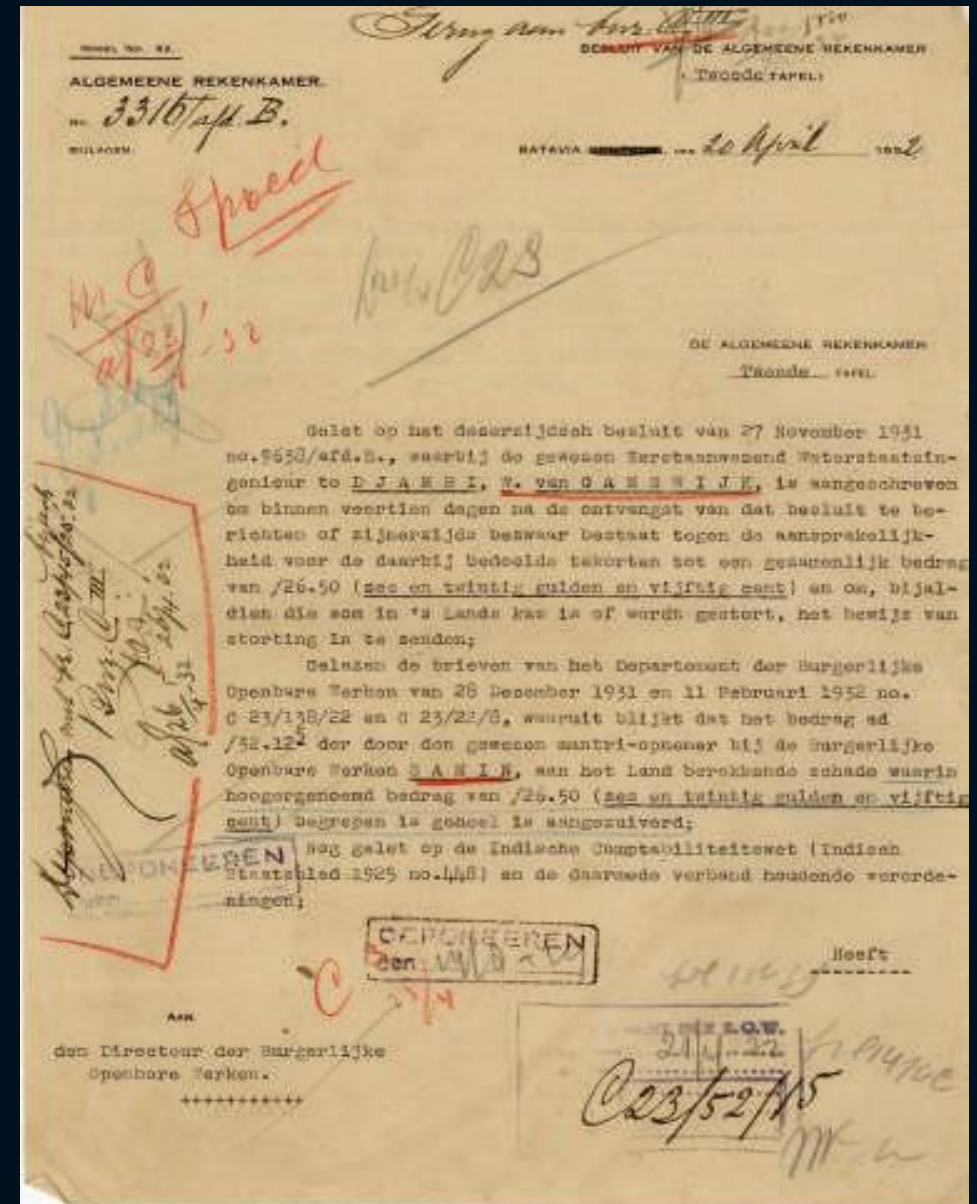
- Kasus penggelapan terhadap laporan keuangan sejumlah 4.932, 6 gulden yang dilakukan oleh Pegawai Departemen van Justitie E. A. Th. Hasse. Departemen van Justitie menjatuhkan hukuman penjara 1 Tahun 3 Bulan terhadap tersangka dan pemecatan terhadap tersangka berdasarkan Besluit No. 5 Tanggal 29 Juli 1931. Berkas arsip berisi antara lain tuduhan penggelapan pajak, pembelaan tersangka, dan tindak lanjut dari kasus tersebut. 27 Mei - 29 Juli 1931

Contoh Arsip



# Grote Bundel Burgerlijke Openbare Werken No. 5519

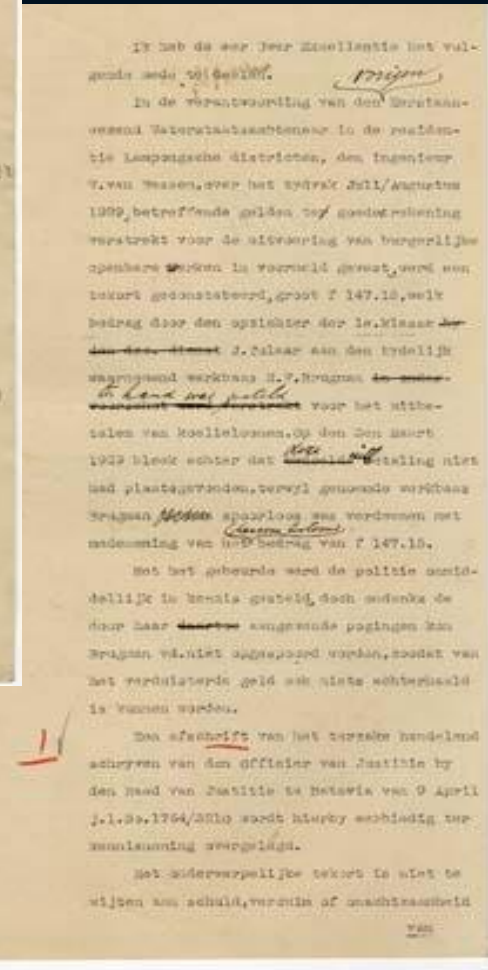
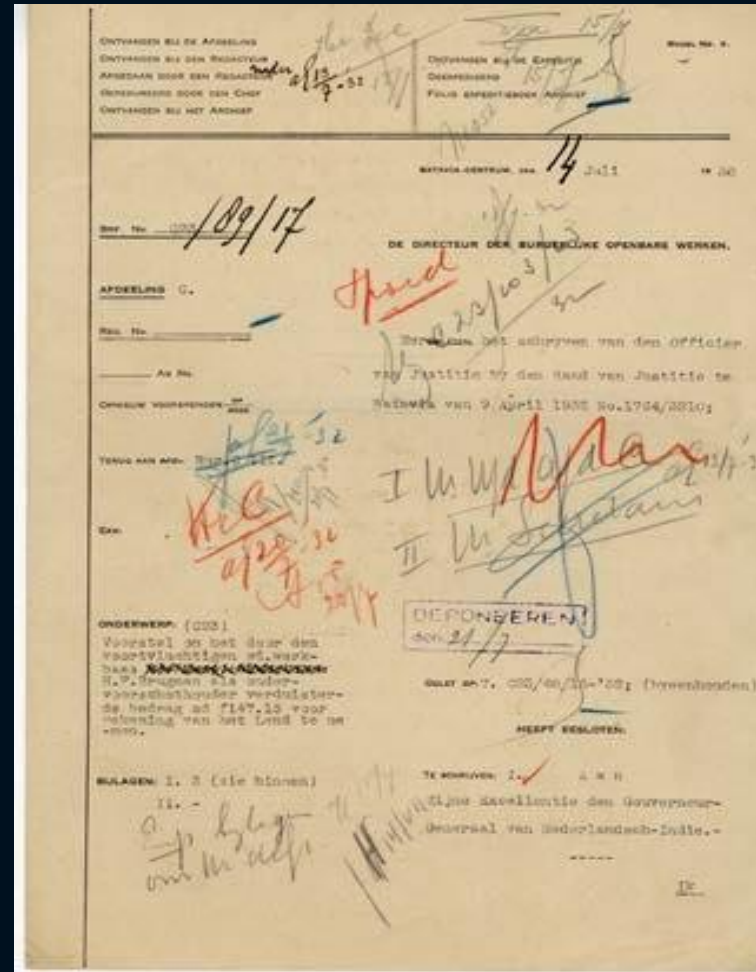
- Bundel Arsip kasus penyelewengan pembebasan tanah oleh Mantri Samin, yang melibatkan Insinyur Perairan Burgelijke Openbare Werken Ir. Van N. genswijk di Residen Djambi.
- Surat dari Direktur BOW kepada Direktur Algemene Rekenkamer tanggal 11 Februari 1932 Nomor c23/22/8 mengenai kasus penyelewengan anggaran untuk pembebasan tanah yang dilakukan oleh Mantri Samin berdasarkan laporan dari Residen Djambi berisi bahwa harga tanah yang dibebaskan tidak lebih dari sejumlah 32.125 gulden. Penyelewengan ini juga melibatkan Insinyur Perairan BOW Ir. Van. N. genswijk dikenakan denda sejumlah 26.50 kemudian yang bersangkutan dibebaskan tugas. 21 Januari 1923 - 20 April 1932



# ANRI, grote Bundel Burgerlijke Openbare Werken No. 5532

- Bundel usulan dari Direktur Burgelijke Openbare Werken kepada pejabat Raad van Justitie Batavia mengenai usulan untuk pengambilalihan hal kepemilikan tanah atas nama H.f Brugman. Berdasarkan Surat pejabat Raad van Justitie Batavia tanggal 9 April 1932 Nomor 1764/13210 H.f Brugman ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan uang pemegang uang muka sejumlah 147.15 gulden di residentie lampongsche districten. Hukuman penyitaan aset diusulkan oleh Direktur Burgelijke Openbare Werken kepada Raad van Justitie dikarena tersangka penggelapan uang H.f Brugman menghilang dan menjadi buronan.
- 9 April 1932 - 8 Agustus 1938

## Contoh Arsip

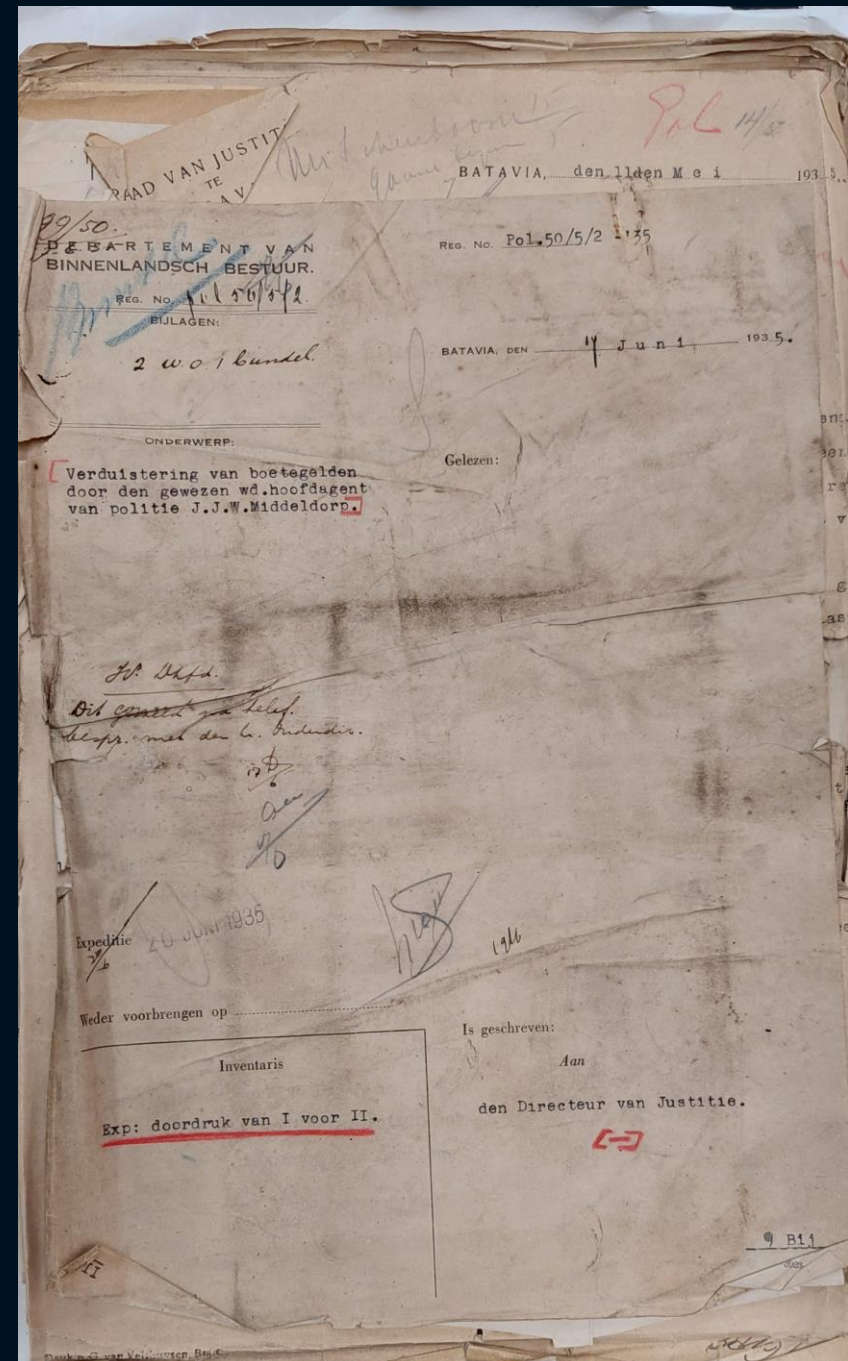




# Binnenlands Bestuur, Grote Bundel afdeling Politie, Nomor 979

- Penggelapan dana denda oleh kepala agen polisi  
J.J.W Midlerop, 17 Juni 1935

Contoh Arsip



# Algemeene Secretarie grote Bundel Missive gouvernement Secretarie No. 5616

- Bundel Arsip penggelapan uang sewa rumah dinas Hakim sebesar 351,50 gulden di residensi Amboina yang dilakukan oleh Juru Tulis Klas IA di Residensi Amboina, A. Pattinasarany. Berdasarkan Surat dari gouvernement Secretaris tanggal 23 April 1937 Nomor 861/B kepada Directeur van Financien mengenai penjatuhan hukuman denda kepada Juru tulis Klas 1A Resident Amboina bernama A. Pattinasarany sejumlah 288 gulden serta pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya. Hakim di residensi Amboina, R.A.W. J, Jonker juga mendapatkan denda sejumlah 175,5 gulden karena dianggap lalai dengan membiarkan A. Pattinasarany melakukan tindakan penggelapan uang ini.

- 21 Desember 1936 - 31 Mei 1937

Model 78

ONTVANGEN BIJ DE AFDELING 4/4 DEN BESLUIT

AFGEDAAN DOOR IDEM 22/4

NAGEZIEN DOOR

BUNDELEN MET 4/4 sb. 15

Voor de verzending s.v.p. nagaan of een verzoek is ontvangen.

VOLG. NO. 20249/36

(AFD. B)

EERSTEDIG TER GOEDKEURING AANGEBODEN

14/11/1936

17/11/1936

BRIEF GOVERNEMENTS SECRETARIS

No. 861/B

SUITENZORG, DEN 23 April 1937

AANLEIDING Inliggende stukken.

ONDERWERP: Schiedewerkzaamheden, wegens dove den geweren 1 en 2 bleek te gelyke van het residenten-geslacht te Amboina, A. Pattinasarany verduisterte overschrijving gelden.

Aan den Directeur van Financien

Onder mededeeling dat tot dusver bij de Regering geen verzoekschrift is ontvangen van den voornamen residenten-geslacht te Amboina, de R.A.W. J. Jonker en den geweren 1 en 2 bleek te gelyke van het residenten-geslacht te Amboina, A. Pattinasarany, houdende het verzoek om ~~ontzetting~~ herziening van het U bekend besluit van 21 December 1936 No. 15, waarbij ~~aan~~ met toepassing van artikel 4 van het Koninklijk besluit van 1 Maart 1904 No. 85 (Indisch Staatsblad No. 241)

Deze BGS behoeft niet ter goedkeuring te worden aangeboden.

REG. 2/11/36

EXP. 2/11/36

IND. 2/11/36

NOT. 2/11/36

O.R. 2/11/36

HERINNEREN.

BEHOORLIJKERD 2/11/36

37

# Algemeene Secretarie Grote Bundel Besluit NO. 3593

- Dugaan penggelapan pajak berdasarkan laporan dari Departement van Financien pada kas Tahun 1941. Departement van Financien Melaporkan adanya perbedaan antara pembukuan dan balance kas, juga terlihat ada defisit kas pada tahun 1941, berdasarkan laporan Departement van Financien No. BGA 14-1-7 tanggal 8 Februari 1941. 24 Mei 1937 - 8 Februari 1941

Archives Example



ONTVANGEN BIJ DE AFDEELING N/12  
-- DEN BEMERKER  
AFGEDAAN DOOR HEM 14/12  
NAGEZIEN DOOR

ONTVANGEN BIJ DEN GOUV. SECRETARIS  
AFGEDAAN DOOR HEM

*Handwritten:* Bundel met  
32 24/1-40-46

*Handwritten:* C. G. - stud.

AG. 3564/44  
(AFD. 3)

**BESLUIT.**

*Handwritten:* 2  
VASTGESTELD.  
14/1/41

*Handwritten:* Batavia den 12 Februari 1941

Gelet op het besluit van 20 Februari 1940 No. 20;  
Belezen het verslag van den Directeur van Financien van 8 Februari 1941 No. Bga 14-1-7 ;

Is goedgevonden en verstaan:

Werkelijk: Te bepalen, dat de uitgaven ter opheffing van verschillen tusschen boek- en kassaldo, ontstaan door kastekorten in comptabele administratiën, die door de betrokken comptabelen niet of niet dadelijk worden aangenuverd en ten aanzien waarvan bij de begrooting geen gebijnde credieten zijn uitgetrokken, voor zoover betreft het dienstjaar 1941, worden aangewezen op de posten voor en

voorzien

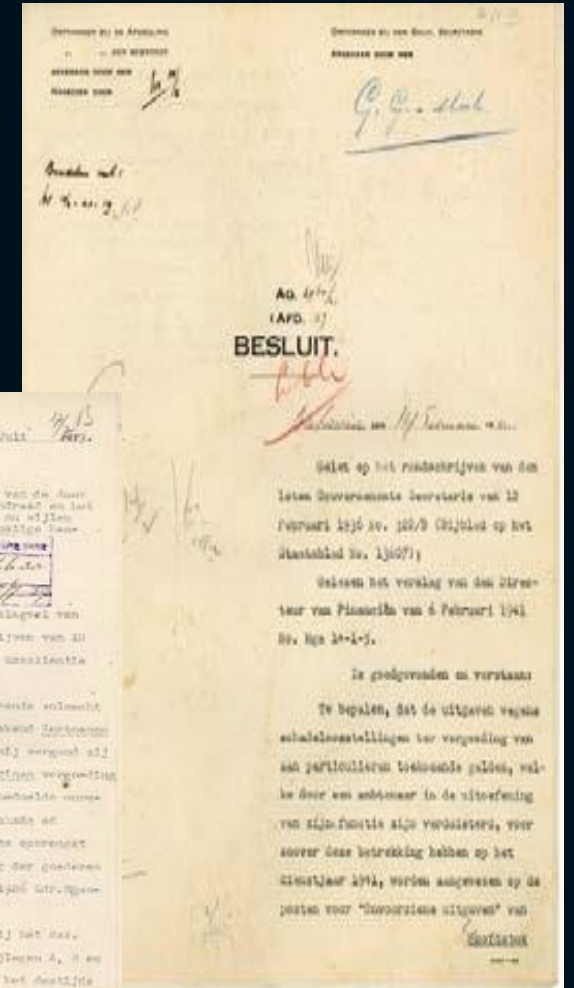
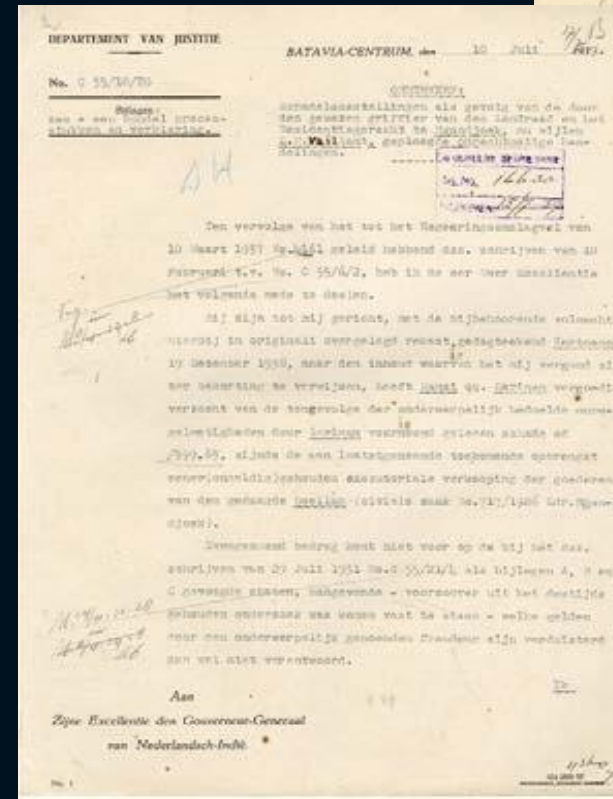
REG. 13/1  
EXP. 17/14  
MIN. 1392  
IND. 8765  
NOT. 1149  
O.R.

B. 835.  
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

# Algemeene Secretarie Grote Bundel Besluit NO. 3595

- Bundel arsip atas nama L. F. Vailant dari Residensi Nganjuk, mengenai tuduhan penggelapan uang sejumlah 300,09 gulden dalam proses penjualan tanah. L. F. Vailant merupakan Mantan Juru tulis Landraad di Residensi Ngajuk, yang dicurigai menerima uang yang tidak seharusnya dalam proses penjualan tanah atas nama Doellah (Sariman) di Ngajuk Jawa Timur pada 30 Juni 1927. L. F. Vailant dengan sengaja menaikkan harga jual tanah untuk kepentingan pribadi.
- 30 Juni 1927 - 14 Februari 1941

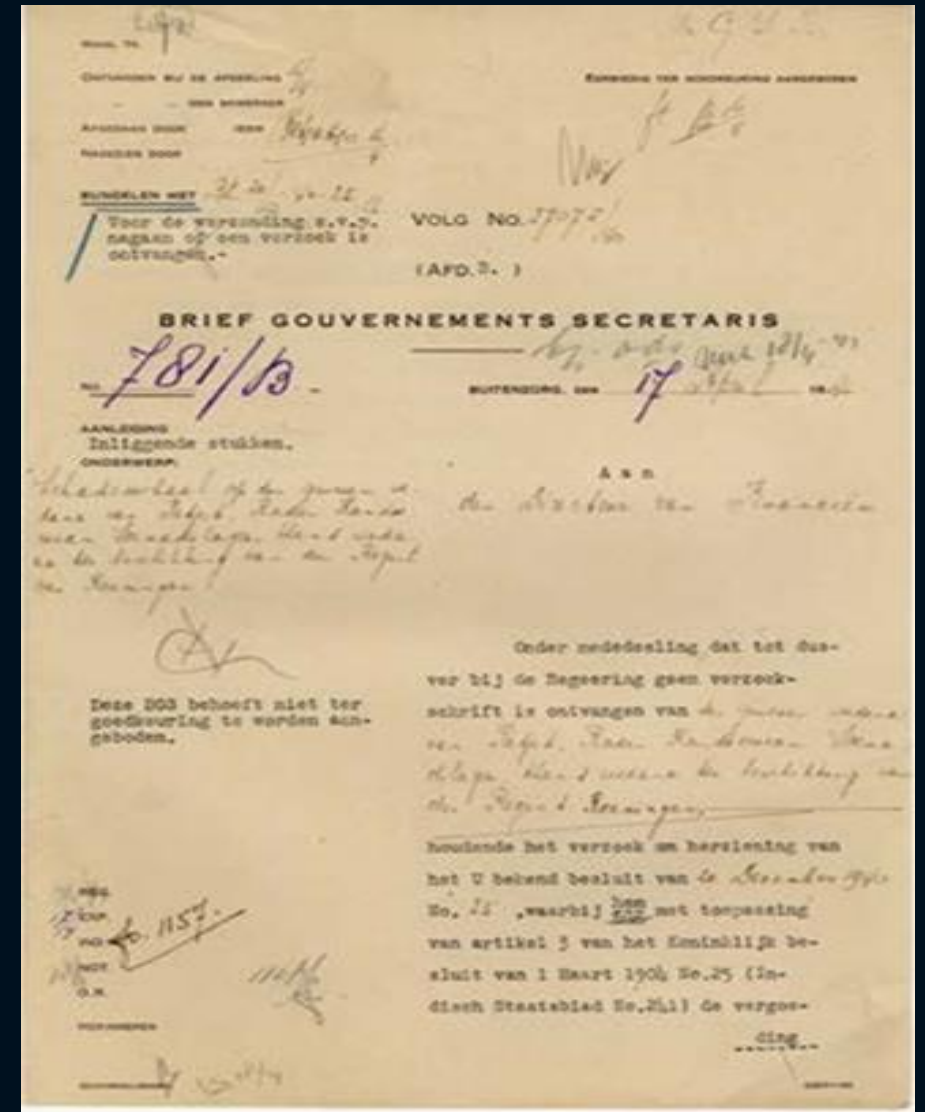
## Archives Example



# Algemeene Secretarie Grote Bundel Missive Gouvernment Secretarie NO. 5826

- Bundel Arsip penggelapan uang sewa tanah pada tahun 1937 sejumlah 1710,59 gulden oleh Wedana Patjet-Modjokerto, Raden Kandoeroean Soemadilaga dan lurah Desa Soekanagalih Tohapradja. Raden Kandoeroean Soemadilaga merupakan atasan Tohapradja lurah Desa Soekanagalih, Distrik Patjet, Regensi cianjur, Residensi Buitenzorg. Atas kejahatan tersebut Raden Kandoeroean Soemadilaga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1673,5 gulden. Sedangkan Tohapradaja mendapatkan pengurangan gaji 37,04 gulden menjadi 1673,55 gulden, serta hukuman penjara selama 1 Tahun 6 Bulan.
- 20 Desember 1940 - 17 April 1941

## Archives Example



$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$



# “Contoh Arsip Korupsi di Lembaga Negara”

—Someone famous

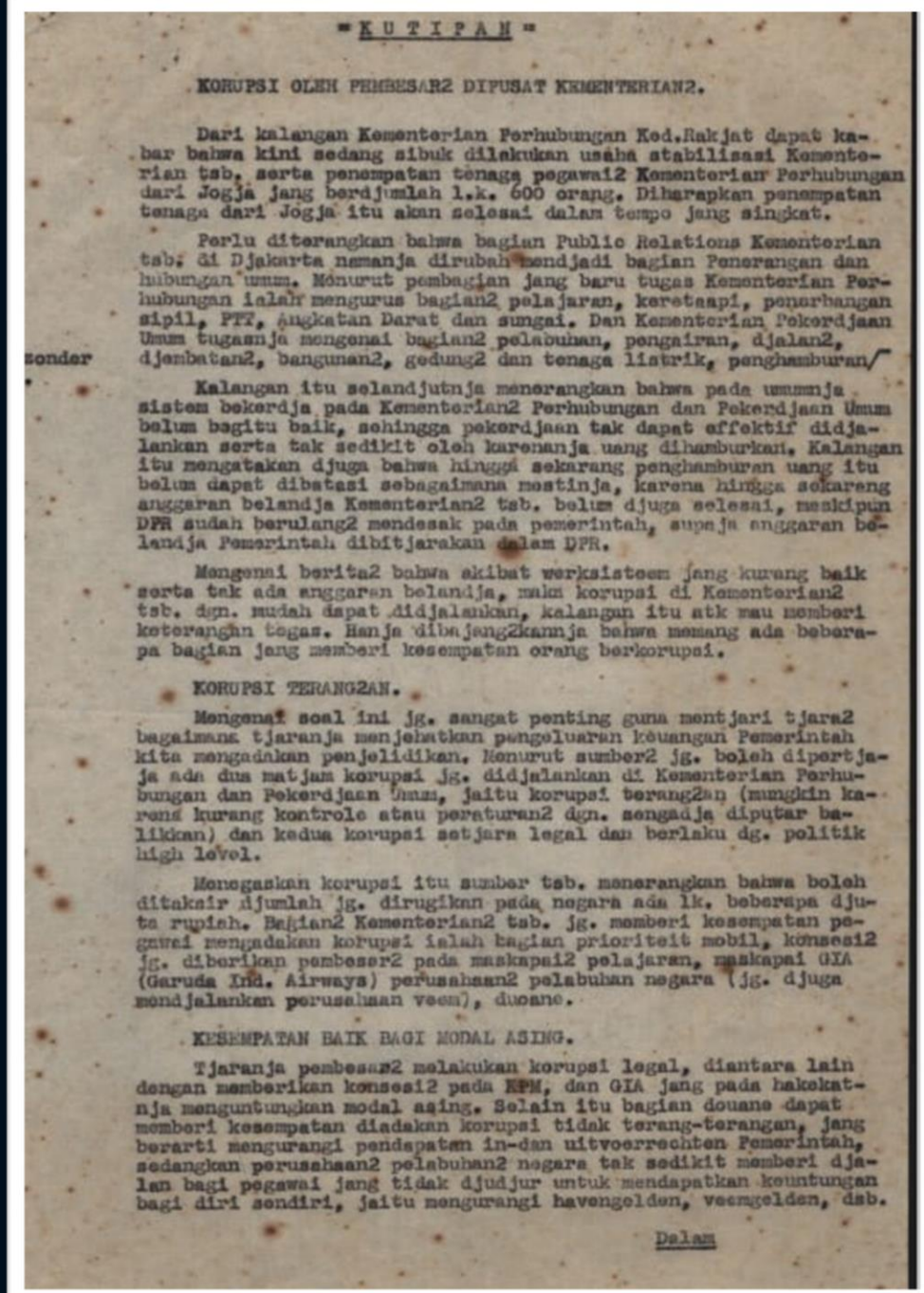
$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

# Kasus Korupsi di Lembaga Negara

Korupsi yang terjadi di Kementerian  
Pekerjaan Umum

Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Sekretariat  
Negara pada masa Kabinet Perdana Menteri  
tahun 1950-1959 Jilid I Nomor 1237

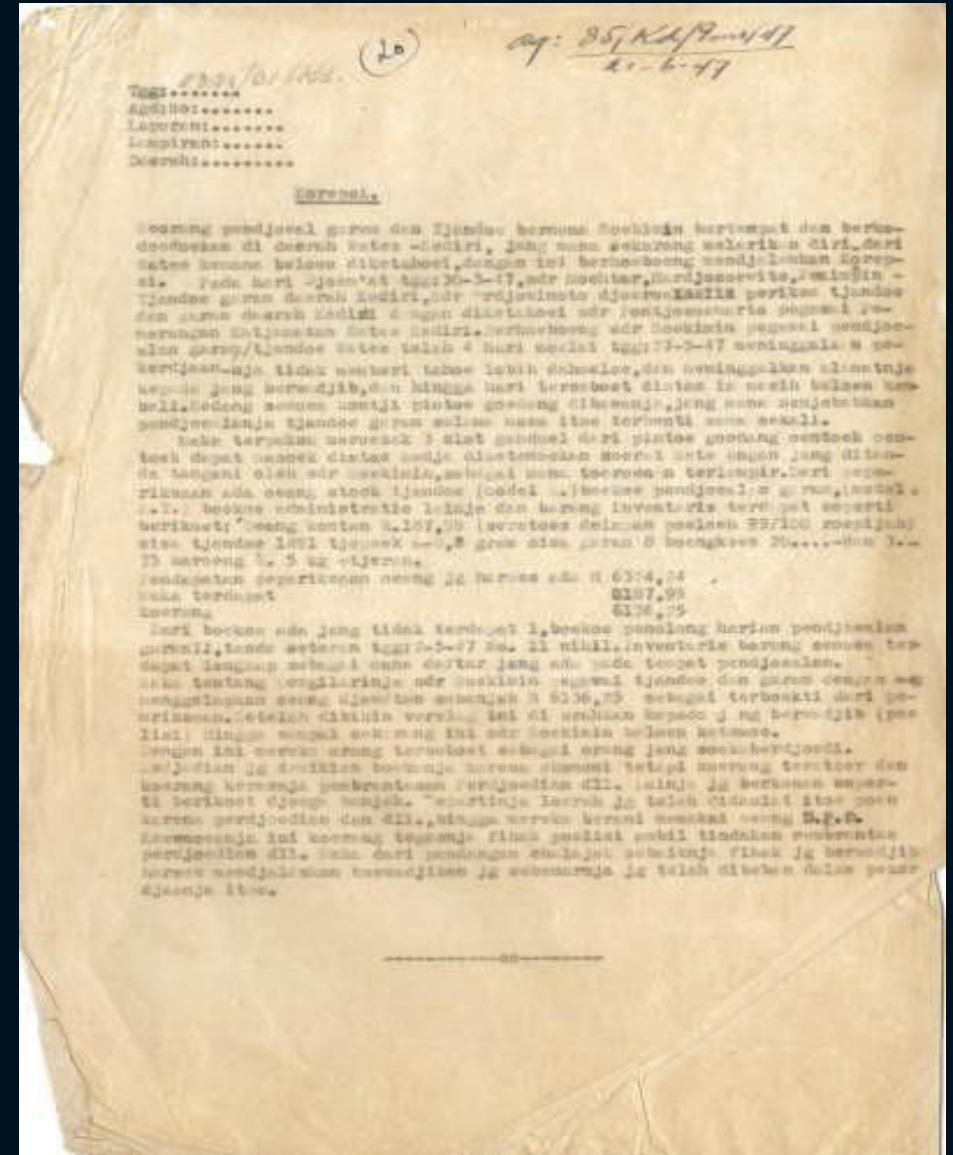
Archives Example >>>>



# Kementerian Pertahanan NO.

# 1706

Tembusan laporan kepada Kementerian Pertahanan tentang seorang pegawai penjaga Gudang Candu-Garam di Wates-Kediri yang menggelapkan uang Jawatan sebesar Rp. 6136,25, Juni 1947.



Archives Example >>>>

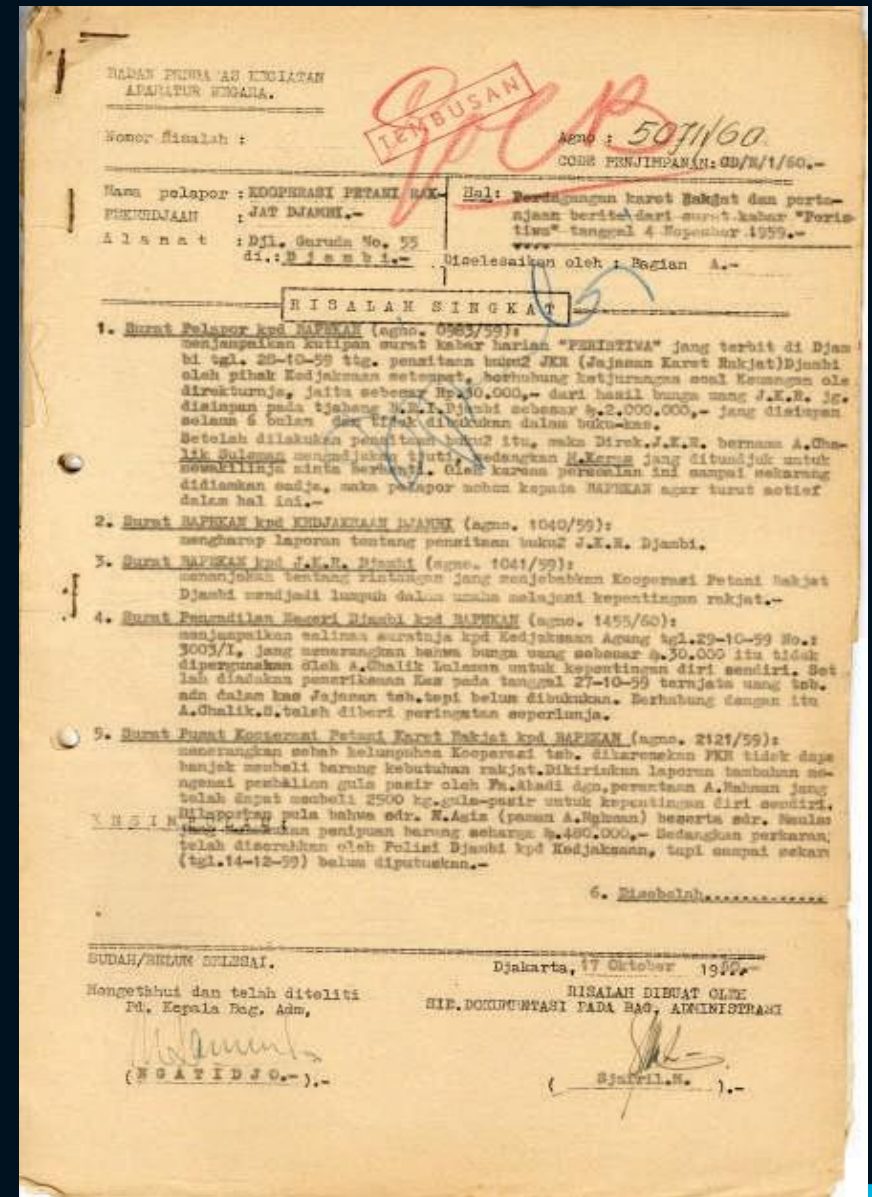


# Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara 1959- 1962 No. 36

Berkas tentang penyelewengan dana  
oleh Direktur Jajasan Karet Rakjat  
Djambi A. Chalik Suleman atas  
bunga tabungan sejumlah Rp.  
30,000.

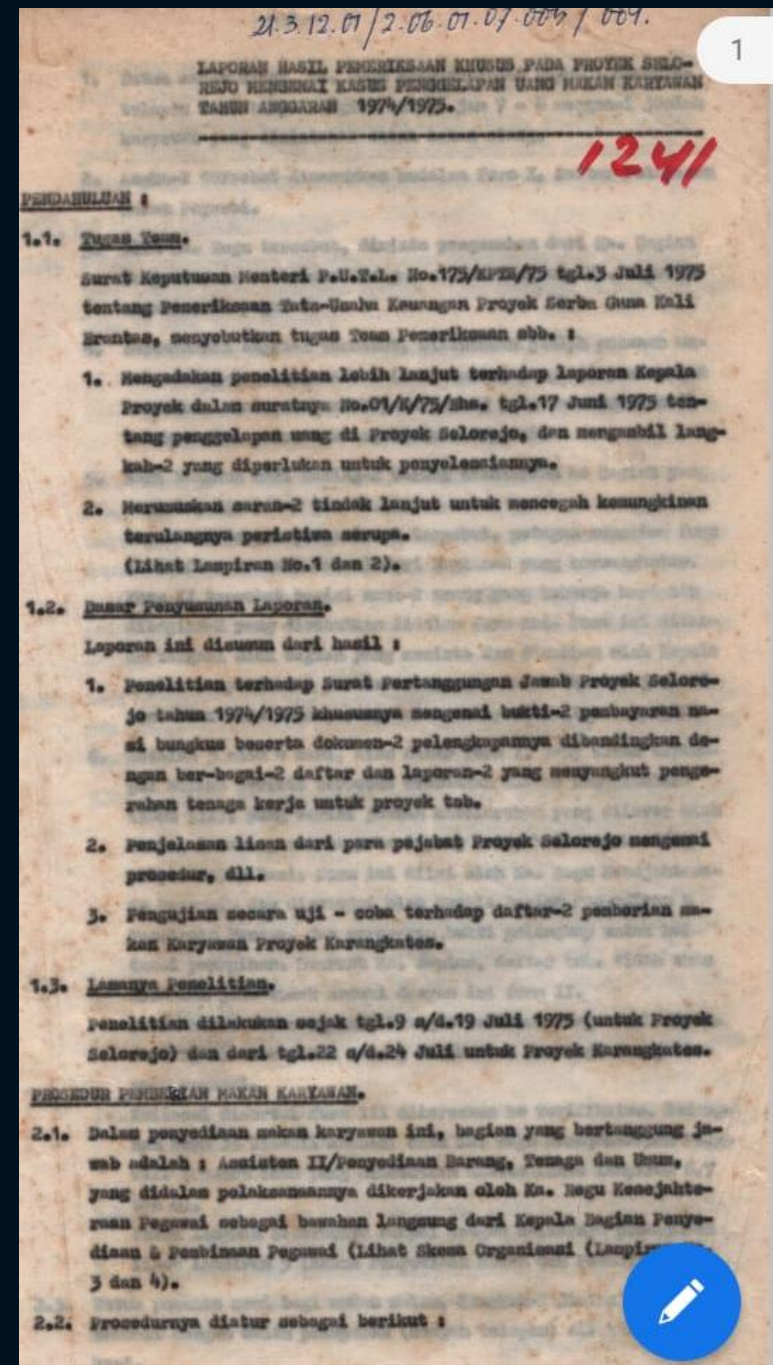
28 Oktober 1959 - 17 Oktober 1960

Archives Example >>>>



# Archives Example

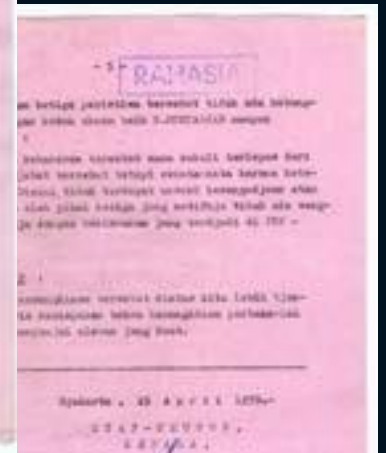
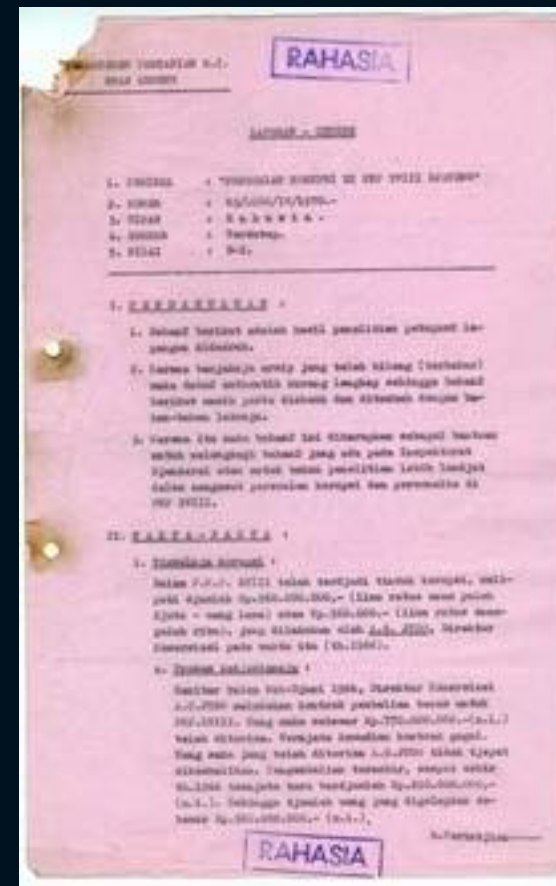
Laporan hasil pemeriksaan khusus Proyek Selorejo tentang kasus penggelapan uang makan pegawai Tahun Anggaran 1974/1975 oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Sumber: ANRI, Inventaris Arsip Perum Jasa Tirta I (1927) 1962-1997



# Kementerian Pertanian RI (1948) 1950-

## 2009 No. 5931

Laporan Khusus dari Staff Khusus  
Departemen Pertanian kepada  
Inspektur Jenderal Departemen  
Pertanian perihal "Persoalan Korupsi di  
PNP XVIII Djawa Tengah" yang diduga  
merugikan negara Rp. 560.000.000,-  
April 1970



Archives Example >>>>

# “Contoh Arsip Korupsi di Militer”

—Someone famous

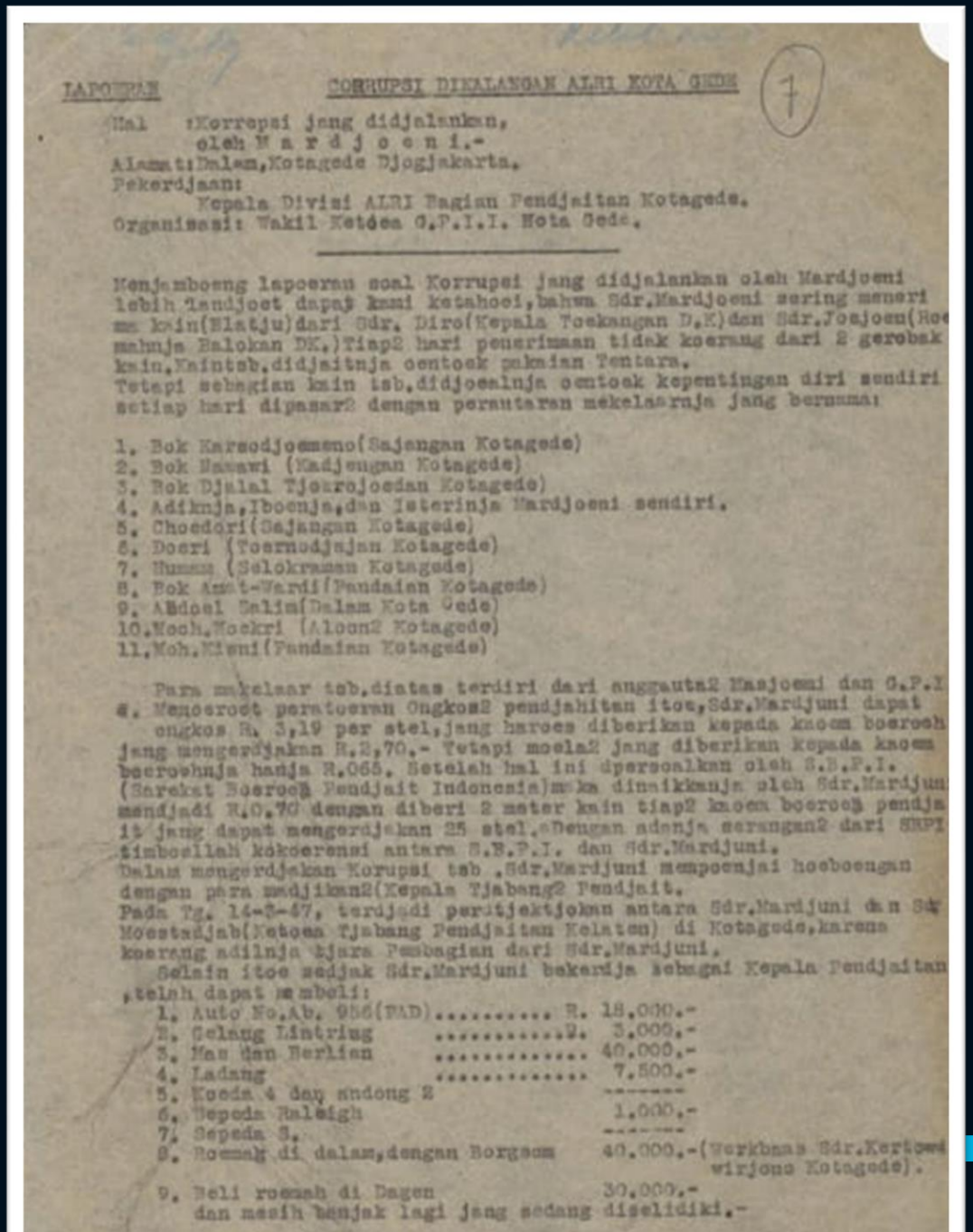


# Kasus Korupsi di Bidang Militer

## Korupsi ALRI di Yogyakarta

Sumber: ANRI, Daftar Arsip  
Kementerian Pertahanan Nomor 1759

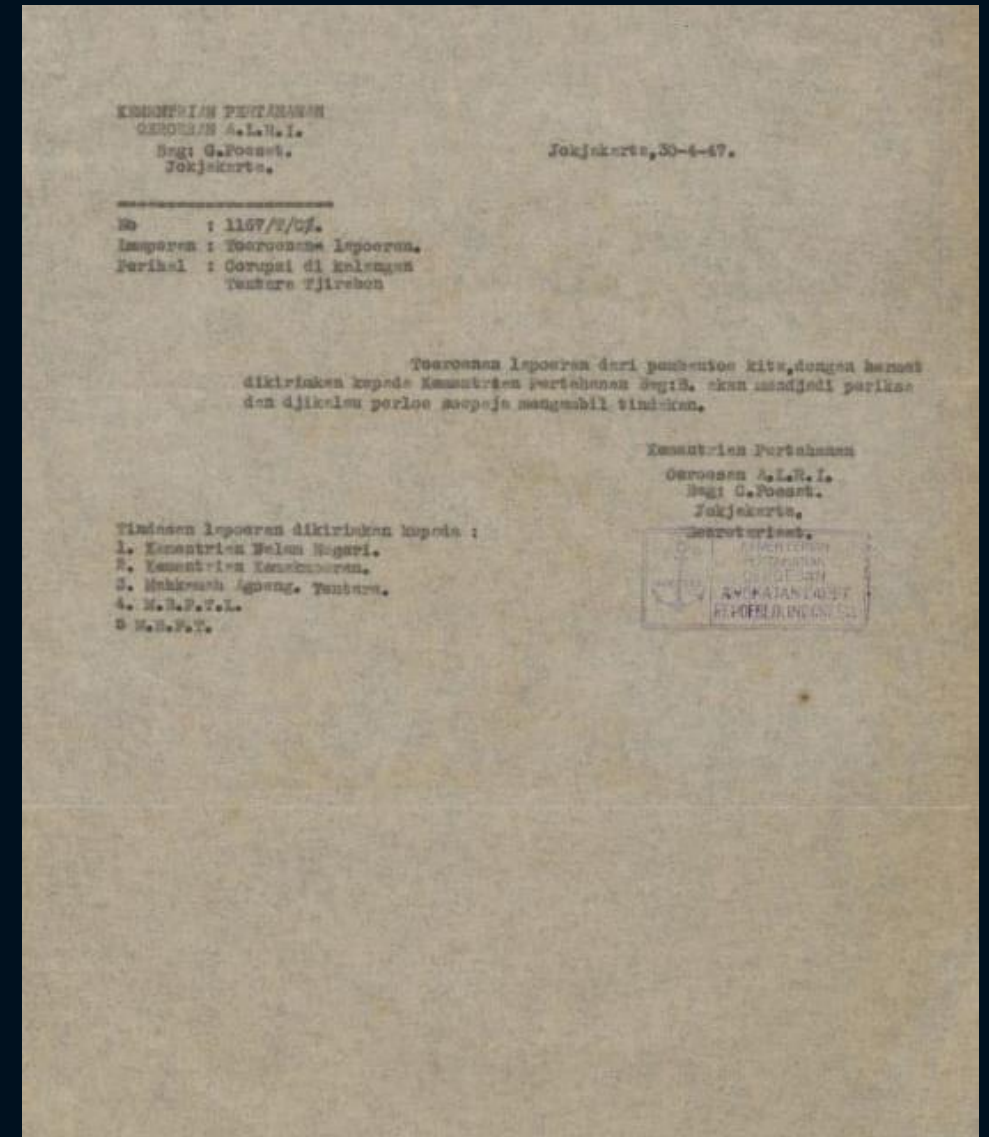
## Contoh Arsip



# Contoh Arsip

Laporan Korupsi Angkatan Darat  
di Daerah Cirebon, Jawa Barat  
tahun 1947

Sumber: ANRI, Daftar Arsip  
Kementerian Pertahanan Nomor  
1818



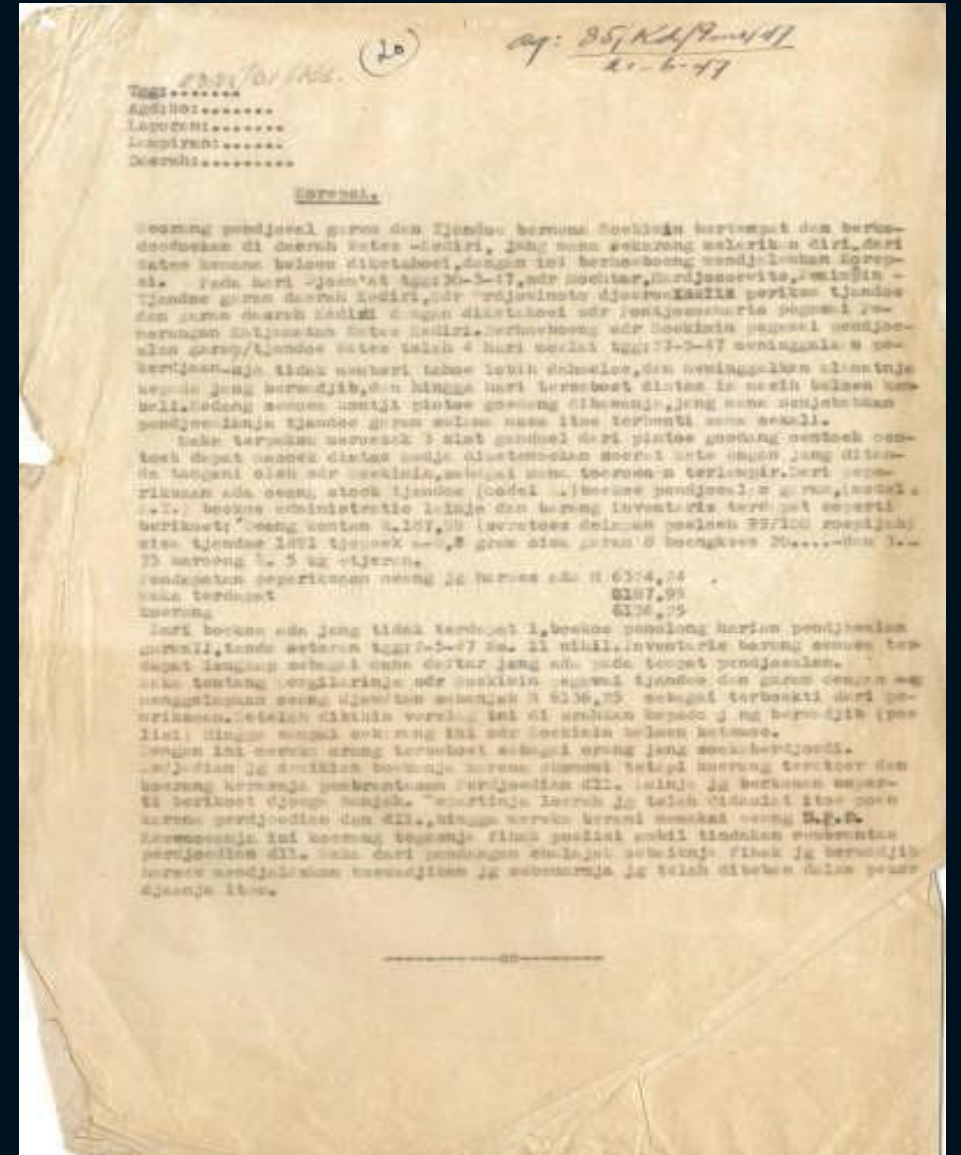
# Kementerian Pertahanan NO.

# 38

Tembusan laporan kepada Kementerian Pertahanan tentang anggota PTRI (Polisi Tentara RI) Probolinggo, Jawa Timur atas nama sdr. Oentoeng yang menerima suap.

April 1947

Archives Example >>>>



# “Contoh Arsip Korupsi di Daerah”

—Someone famous



$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

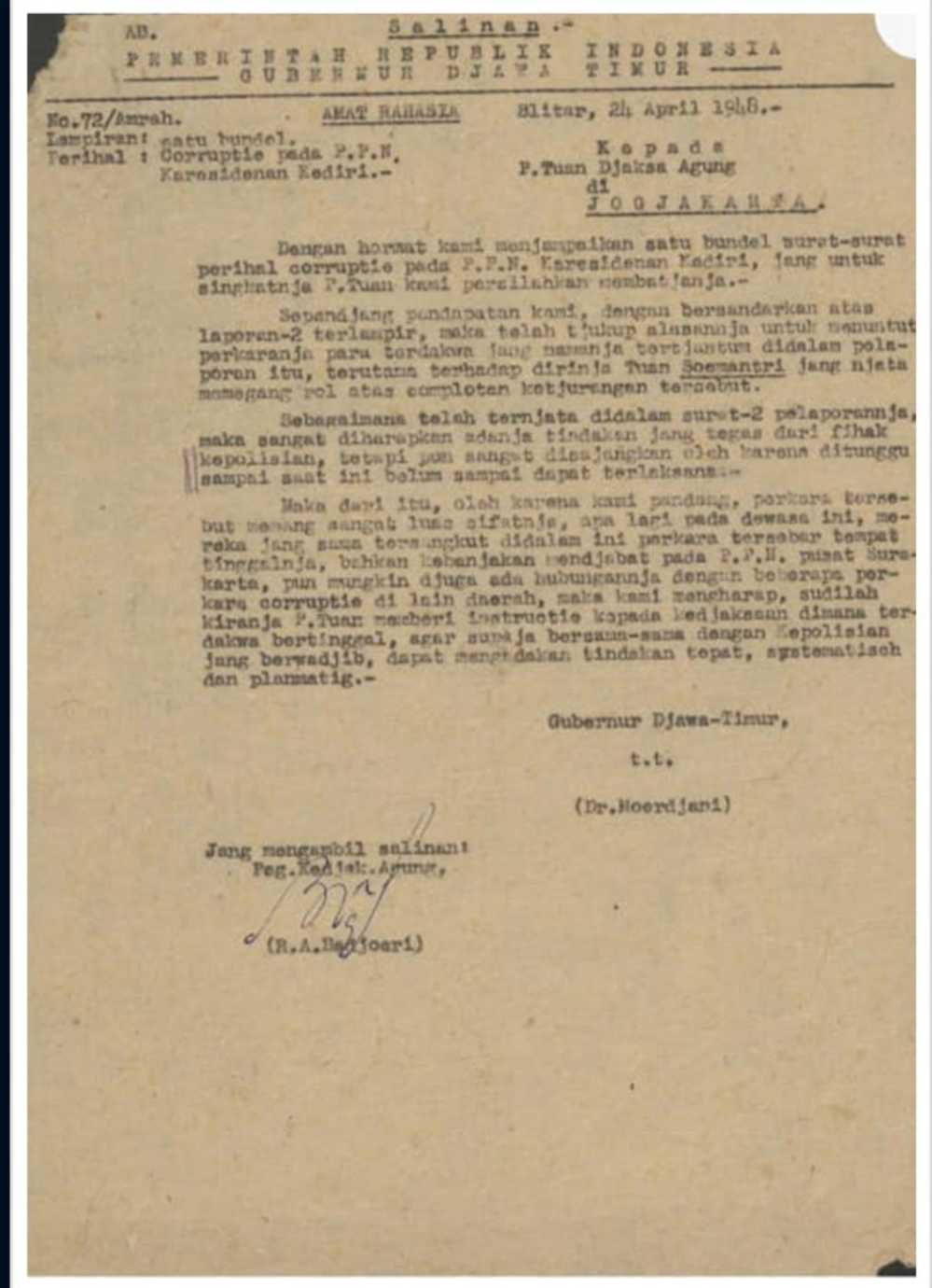


# Kasus Korupsi Di Daerah

Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Karesidenan Kediri, Jawa Timur pada tahun 1948

Sumber: ANRI, Inventaris Kepolisian Negara Nomor 1028


Contoh Arsip



# Contoh Arsip

Dugaan Korupsi Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara Tahun 1989

Sumber: ANRI, Inventaris Sekretariat Negara RI : Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969 – 1999 Nomor 727

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI SELATAN**  
**SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH**  
Jalan Kenanga Nomor 1 Telepon 1  
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, 5 Oktober 1989

KEPADA YTH.  
BAPAK MAJLIS PEMERINTAH KABUPATEN PADANGSIDIMPUAN  
(Transal. Pos 5000)

DI -  
J A K A R T A

URUTAN : 130/6186  
KIRAT : H - H a s i a  
LAMPIRAN :  
TENTANG : Penyelenggaraan pekerjaan oleh Bupati Tapanuli Selatan.

1. Selubungan dengan surat Bupati Wakil Presiden RI No. 3.5005/WK.Pres/Was /7/00/89 tanggal 14 Agustus 1989 perihal dipakal surat ini, dilampirkan sebagai berikut :

a. Masalah penyelesaian uang Bantuan Desa tidak diperoleh data bahwa Bupati telah menyelesaikan uang Bantuan. Bahkan hal ini tidak mungkin terjadi karena tidak ada pada pelak sebagai Bantuan Desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban proyek karena diangan Bupati Desa dan LKSD. Demikian juga penyaluran uang Bantuan langsung diterima para Bupati Desa dari NRI Unit Desa tanpa melalui Bupati Kepala Daerah Tk. II - Tapanuli Selatan.

Bantu Uang Bantuan Desa di Daerah Tk. II Tapanuli Selatan sampai dengan Tahun 1988/1989 telah terkumpul sebagaimana mestinya.

b. Masalah uang Bantuan Eksaminasi, diinformasikan bahwa sisa uang - Bantuan yang belum disalurkan baik yang berasal dari Dana Ceteang - reyang Eksaminasi maupun dari Bantuan Pemerintah dan Masyarakat - masih terakumulasi di EPDSU Cabang Padangsidempuan dalam rekening Bupati Kepala Daerah Tapanuli Selatan No. 1276 dengan jumlah Rp. 123.719.563,69 per 30 September 1989.

Dana yang tidak tersalurkan ini berasal dari sisa lebih jumlah dana yang diterima baik dari Dana Ceteang reyang Eksaminasi, Pemerintah dan masyarakat setelah dilindungi dengan Bantuan yang telah disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan.

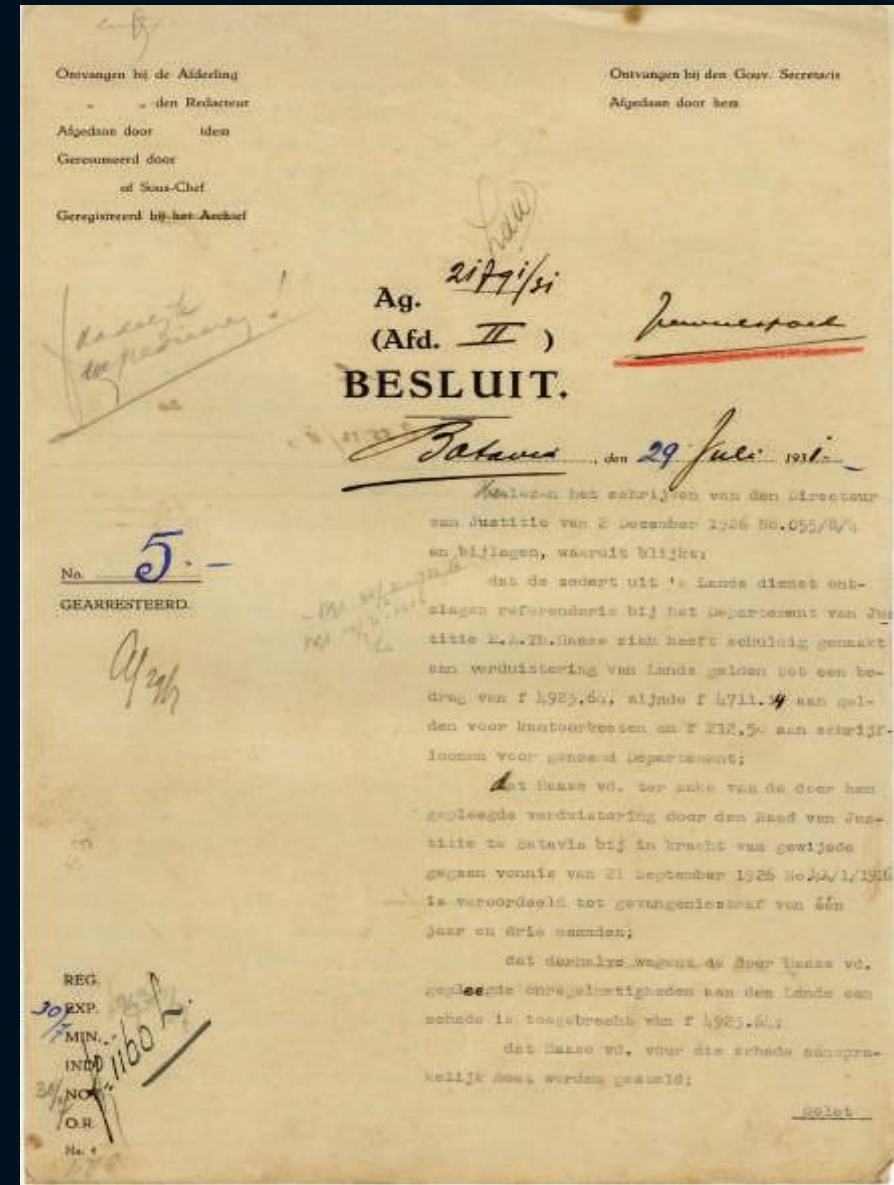
Pengaturan penggunaan sisa lebih ini masih dalam peninjauan. Dengan demikian tuduhan penyelesaian sisa uang Bantuan Eksaminasi di Tapanuli Selatan tidak berdasar sama sekali.

c. Sisa ....

# Sekretariat Negara Seri Tromol Pos 5000 No.7241

- Surat dari Asisten Wakil Presiden RI urusan Pengawasan kepada Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Perihal dugaan adanya penyelewengan di Pertambangan Propinsi Jawa Barat yang laporannya berasal dari Tromol Pos 5000 agar dilakukan penyelidikan. Oktober 1989

Contoh Arsip



# “Contoh Arsip Korupsi di BUMN”

—Someone famous



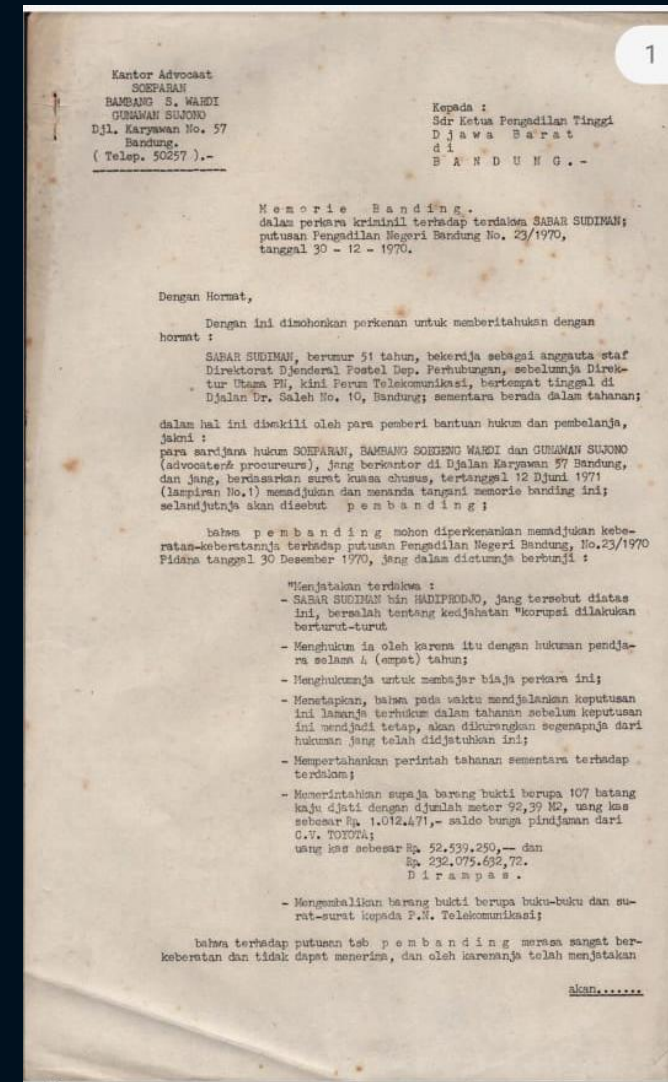
$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

# Kasus Korupsi di BUMN

Nota banding atas nama Sabar Sudiman, mantan Direktur Utama PN Telekomunikasi (Perusahaan Telekomunikasi Nasional) untuk kasus korupsi tahun 1970

Sumber: ANRI, Inventaris Arsip PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk 1966-2006 Nomor 185

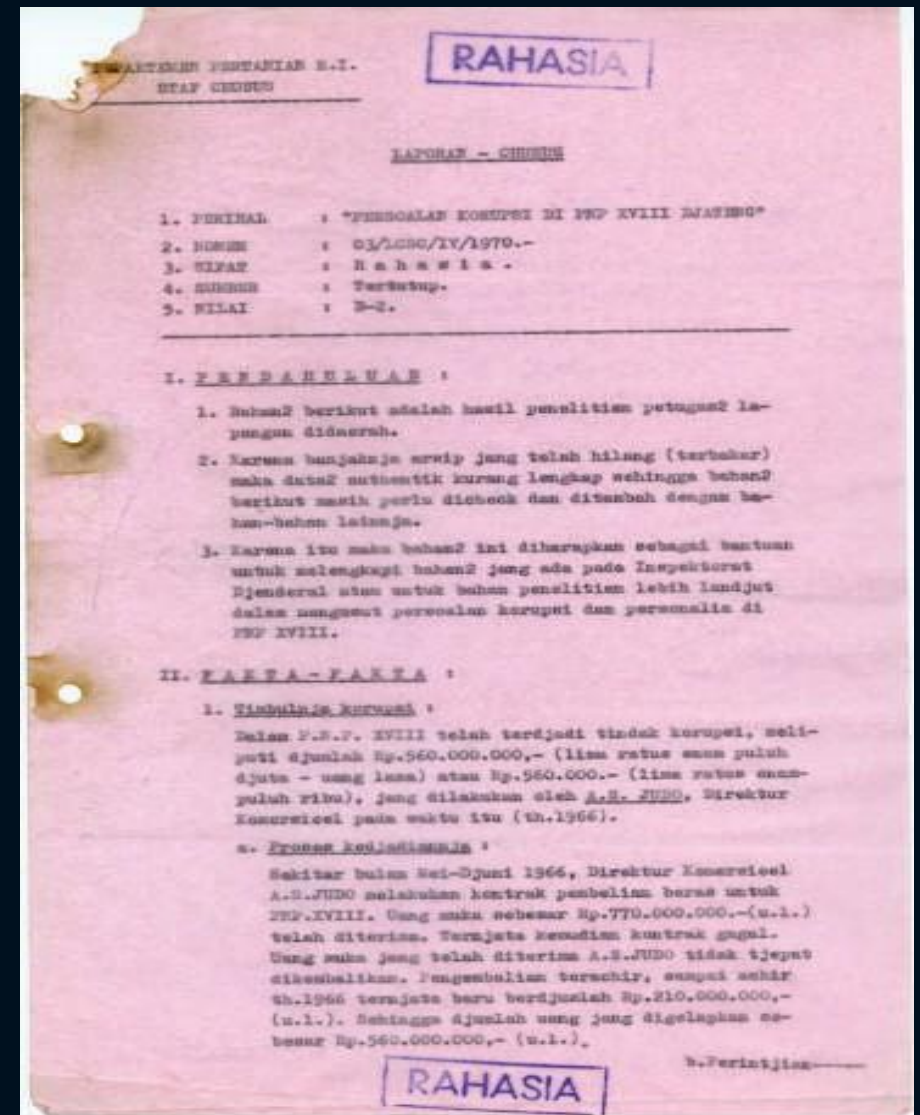


# Kementerian Pertanian RI

(1948) 1950-2009 No. 5931

Laporan khusus dari Staff Khusus Departemen Pertanian kepada Inspektur Jenderal Departemen Pertanian perihal “Persoalan Korupsi di PNP XVIII Jawa Tengah” yang diduga merugikan negara Rp. 560.000.000,- April 1970

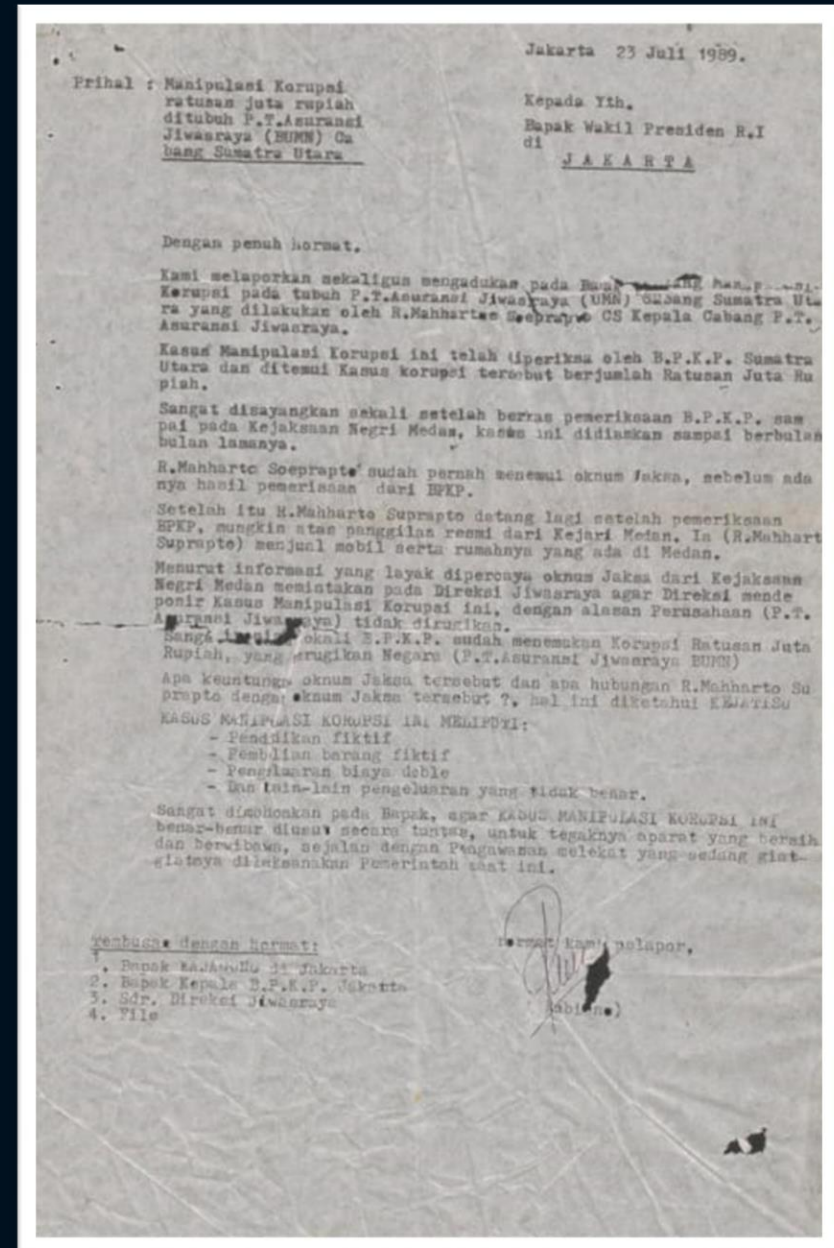
Archives Example >>>>



## Korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Perusahaan Asuransi Nasional) pada tahun 1989

Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI :  
Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969  
– 1999 Nomor 730

# Archives Example >>>>



# Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI : Sekretariat Wakil Presiden (1967) 1969 – 1999 Nomor 5417

Surat dari Inspektur Perusahaan  
Pertamina kepada Asisten Wakil  
Presiden RI Urusan Pengawasan perihal  
dugaan adanya korupsi di PPDN  
PERTAMINA Kantor Pusat dalam  
pengadaan 6000 Roll OPP Tape  
Transparant pada TA 1988/1989. Agustus  
1994

## Contoh Arsip



PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA  
(P E R T A M I N A)

KANTOR PUSAT  
Jalan Medan Merdeka Timur No. 10 JAKARTA 10110  
Kode Pos 10110

**RAHASIA**

ALAMAT SURAT "PERTAMINA" TELEFON: 021-521110111 FAX: 021-521110111 TELEK. 021-521110111/021-521110111

Nomor: B-214/J0000/94-88 Tanggal: 19 Agustus 1994


Kategori: S.t.d. Yang terhormat,

Perihal: Dugaan adanya Korupsi di Asisten Wakil Presiden R.I.  
PPDN PERTAMINA / Kantor Urusan Pengawasan  
Pusat. Jl. Kebun Sirih No. 14  
Jakarta

Menunjuk Surat Asisten Wakil Presiden R.I. Urusan Pengawasan  
No. B-1300/Wk.Pres/Was/E/05/1989 tanggal 24 Mei 1989 perihal  
tersebut di atas.  
Sehubungan dengan hal tersebut, setelah dilakukan penelitian  
hasilnya dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Benar telah terbukti adanya kolusi antara beberapa  
pejabat Direktorat PPDN dengan rekanan dalam pengadaan  
6000 Roll OPP Tape Transparant untuk keperluan Dinas  
Fabrikasi pada TA 1988/1989.
2. Tindakan yang telah dilaksanakan:
  - 2.1. Surat pesanan yang belum selesai/sedang dilaksanakan  
tidak diperpanjang lagi untuk menghindarkan korupsi  
Perusahaan.
  - 2.2. Para pejabat/pegawai yang terlibat telah diberi  
tindakan administratif (terlampir) dan telah  
dimutasikan ke jabatan/tempat lain yang tidak  
operasional.
  - 2.3. Kepada Mitra Usaha yang bersangkutan (PT. ANGLONAS  
ERTIA) telah ditegor dan dicoret dari daftar rekanan  
PERTAMINA.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya  
diucapkan terima kasih.

**P E R T A M I N A**  
Inspektur Perusahaan  
  
SARYORO

Tembusan: Yth.  
1. Bapak Wakil Presiden R.I.  
2. Irjen Departemen Pertambangan & Energi  
3. Bapak Direktur Utama  
4. Direktur PPDN

02 - 521110



$$\frac{\sqrt{2.8}}{3+2^+}$$

# “Sekilas Penelitian tentang Arsip Korupsi”

—Someone famous



$$\frac{4+6+(2\sqrt{3})}{\sqrt{276}}$$

## About Us

the Archives Study Center for Eradication Corruption (Pusat Studi Arsip For colleagues who want to see archives regarding corruption, please visit [www.anri.go.id/page/baca-arsip-tindak-pidana-korupsi](http://www.anri.go.id/page/baca-arsip-tindak-pidana-korupsi)

For Online Archives exhibition related to corruption archives, please visit [www.anri.go.id/page/virtual-tour-arsip-korupsi](http://www.anri.go.id/page/virtual-tour-arsip-korupsi)

If there are difficulties in searching the corruption archives, please contact by email [psapkorupsi@anri.go.id](mailto:psapkorupsi@anri.go.id)



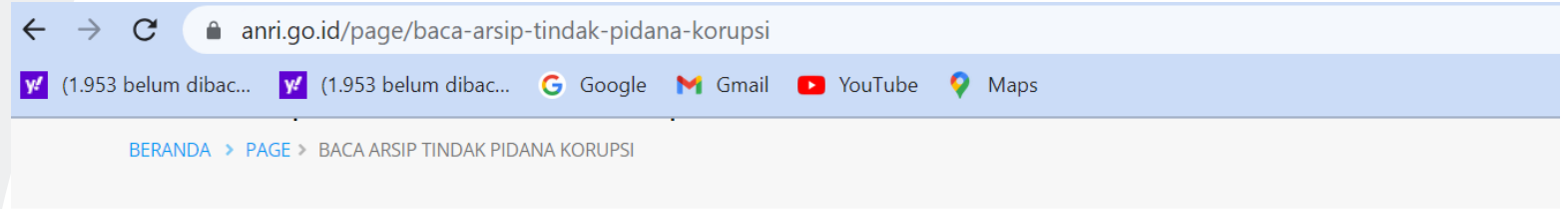


$$\frac{C^3 + 5CA}{2CA}$$

$$\frac{C - B}{3 - D}$$



Website

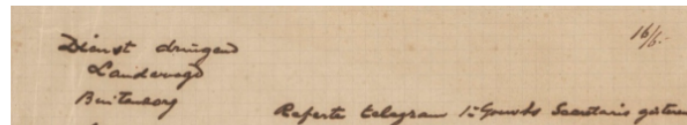


# BACA ARSIP PENEGAKAN HUKUM

## Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi

Arsip Nasional Republik Indonesia

1. Khazanah ALGEMENE SECRETARIE, SERIE GROTE BUNDEL MISSIVE GOUVERNEMENTS SECRETARIES 1890 - 1942



1. ALSEC GROTE BUNDEL\_MGS 1890-1942 No 1337

Lands en andere drukkerijen. Boekwerken. Het categorisch



$$\frac{C^3 + 5CA}{2CA}$$

$$\frac{C - B}{3 - D}$$

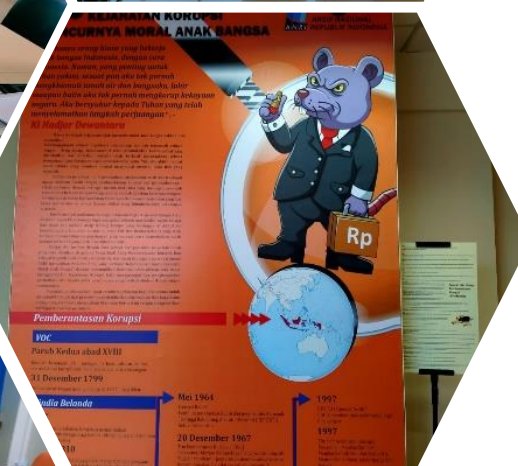


# Pameran Virtual

The screenshot shows a web browser displaying the ANRI website. The address bar shows the URL `anri.go.id/page/virtual-tour-arsip-korupsi`. The browser's address bar includes navigation icons and search engines like Google, Gmail, YouTube, and Maps. The website header features the ANRI logo and the text "ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA". A navigation menu contains links for BERANDA, PROFIL, SEKITAR ARSIP, INFORMASI PUBLIK, LAYANAN PUBLIK, PUBLIKASI, PERATURAN, and REFORMASI B. The main content area displays the title "Virtual Tour Arsip Korupsi" with a breadcrumb trail: BERANDA > PAGE > VIRTUAL TOUR ARSIP KORUPSI. Below the title is a video player showing a virtual tour of the "Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi". The video player has a blue overlay with the text "Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi". To the right of the video player, there is a "BERITA TERBARU" section with a news item titled "ANRI Menyerahk Citra Daerah ..." dated 19-06-2023.

# PSAPK

Ruang Studi dan Layanan



# Terima Kasih

---

Mohon Maaf jika ada kekeliruan

- Anak hebat tidak lupa sarapan,  
Roti gandum diolesi selai,  
Terima kasih kami ucapkan,  
Sudah mendengarkan sampai selesai



# JEJAK KORUPSI DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

(DISAMPAIKAN DALAM MEMPERINGATI HARI ARSIP NASIONAL)

OLEH:  
BEREN RUKUR GINTING  
DIREKTUR ANALISIS DAN PEMERIKSAAN I  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

JAKARTA, 18 JULI 2023



Korupsi masih menjadi permasalahan di hampir semua negara termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara (inefisiensi proses produksi dan misalokasi sumber daya), menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan dan melemahkan institusi publik. Bahkan korupsi dapat pula menurunkan tingkat kebahagiaan di suatu negara (negara korup cenderung tak bahagia)



# KORUPSI DAN PENANGANAN KORUPSI DALAM ANGKA

## TOP 5 HIGHEST GLOBAL CPI 2022

## TOP 5 THE LOWEST GLOBAL CPI 2022

SCORE	90	87	84	83	82
	DENMARK	FINLAND	NORWAY	SINGAPORE	SWITZERLAND

NEW ZEALAND

SWEDEN

	12	13	14	16	17
	SOMALIA	SYRIA	VENEZUALA	YEMEN	BURUNDI

SOUTH SUDAN

EQUATORIAL GUINEA

HAITI

NORTH KOREA

LIBYA

RANK

1

2

3

4

5

180

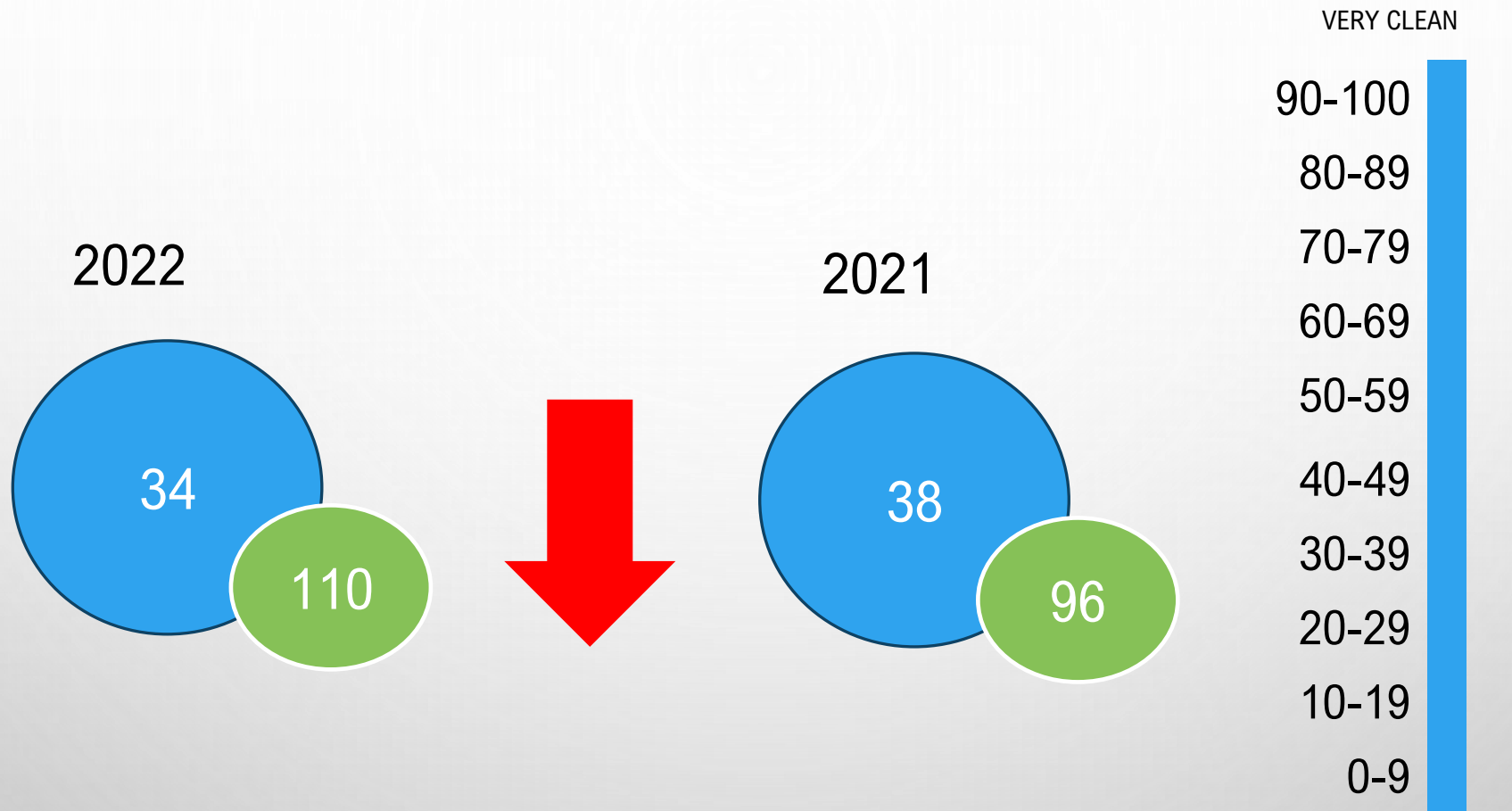
178

177

176

171

# INDONESIA CPI 2022 DAN 2021

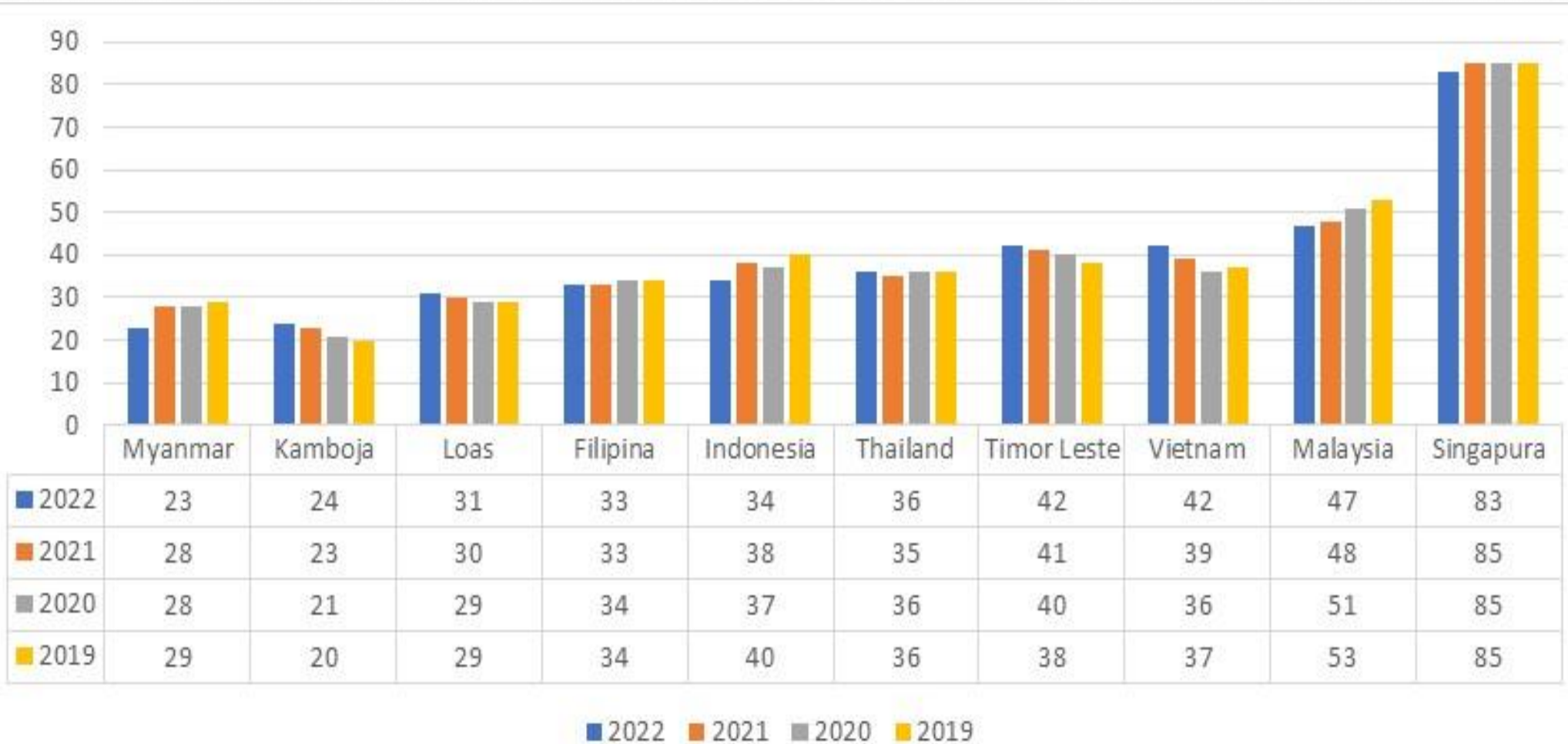


## NOTE:

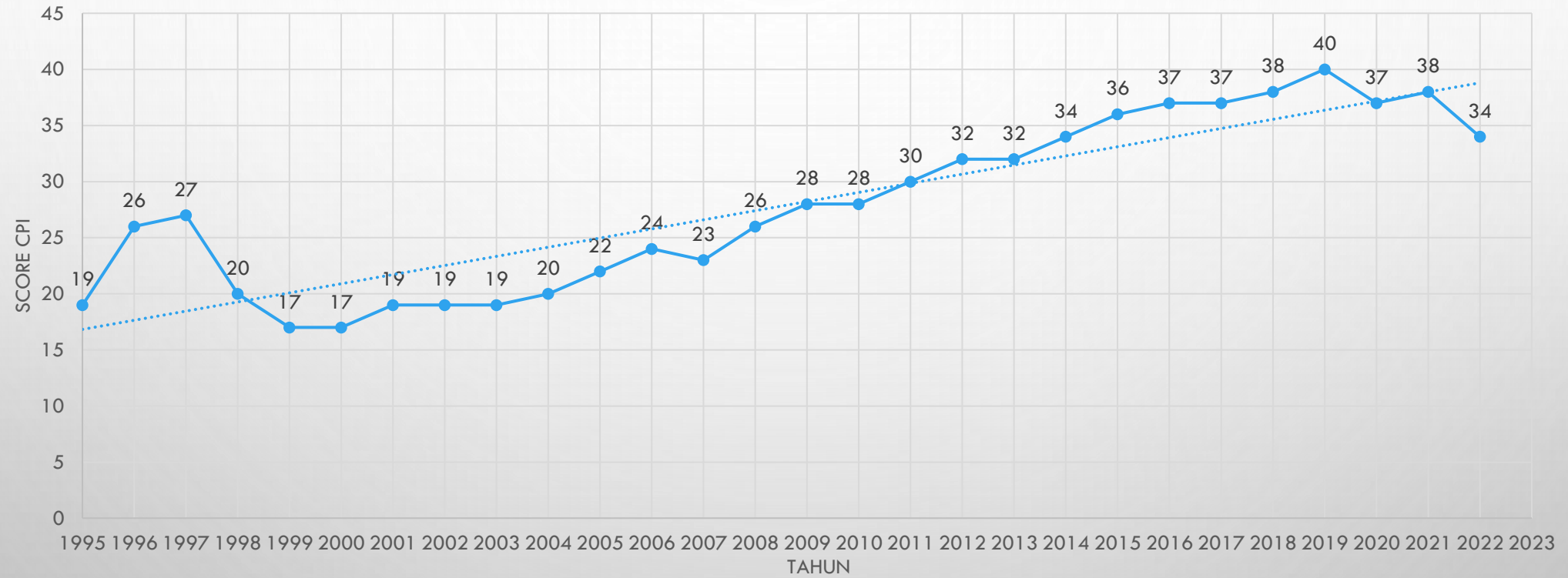
Data pendorong penurunan skor IPK Indonesia adalah:

1. Political risk service/PRS International Country Risk Guide (korupsi dalam system politik, konflik kepentingan politik dan pebisnis, suap untuk izin Ekspor-Import. Skor turun 13 poin dari 48 menjadi 35 pada 2022)
2. IMD World competitiveness yearbook (suap dan korupsi dalam system politik. Skor turun 5 poin dari 44 menjadi 39 pada 2022)
3. Political Economic Risk Consultancy/PERC Asia Guide Risk (mengukur seberapa parah korupsi di suatu negara. Skor turun 4 poin dari 32 ke 29 pada 2022)

# ASEAN CORRUPTION PERCEPTION INDEX



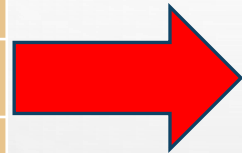
## 2 DEKADE INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA



# RULE OF LAW INDEX 2022<sup>\*)</sup>

## SKOR GLOBAL

NEGARA	RANKING	SKORE
DENMARK	1	0.90
NORWAY	2	0,89
FINLAND	3	0.87
SWEDEN	4	0.86
NETHERLANDS	5	0,83
<b>INDONESIA</b>	<b>64</b>	<b>0,53</b>
MOLDOVA	68	0,52
AFGANISTAN	138	0,33
CAMBODIA	139	0,31
VENEZUELA	140	0,26

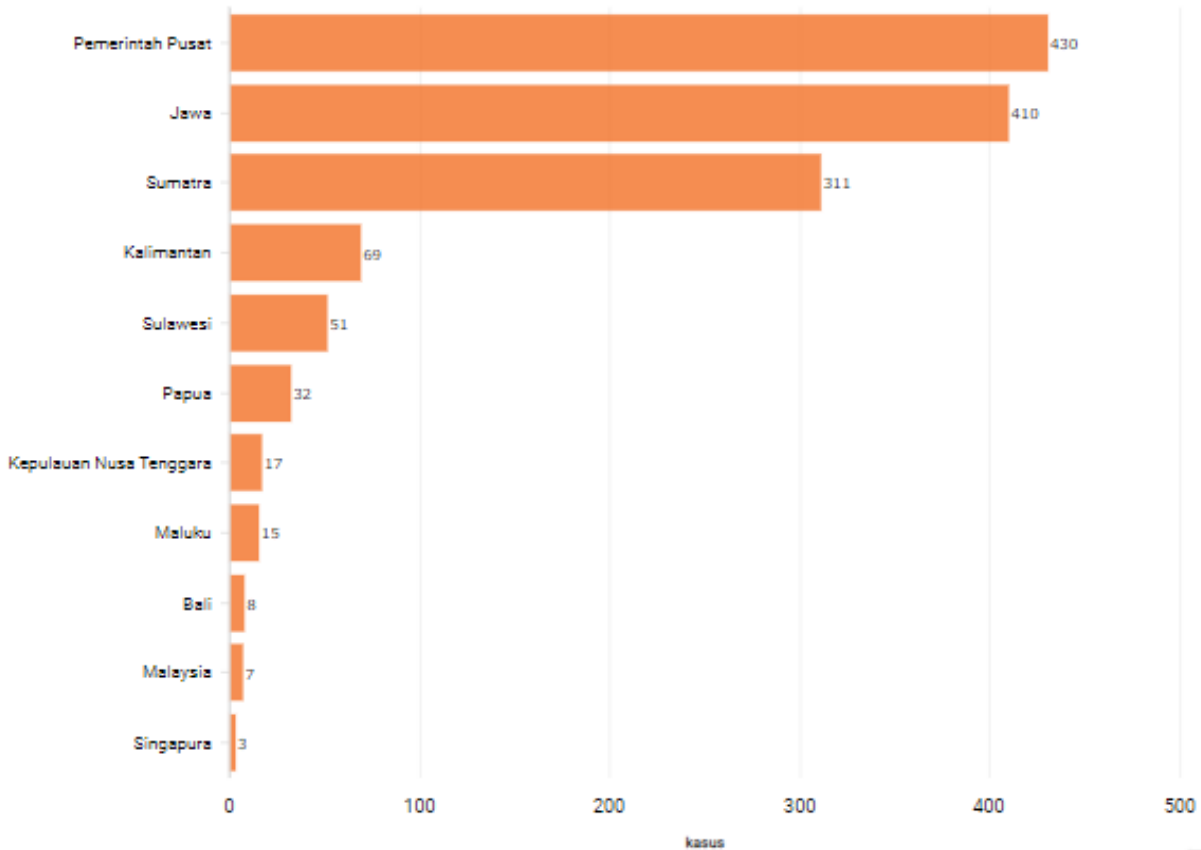


## SKOR 8 FAKTOR

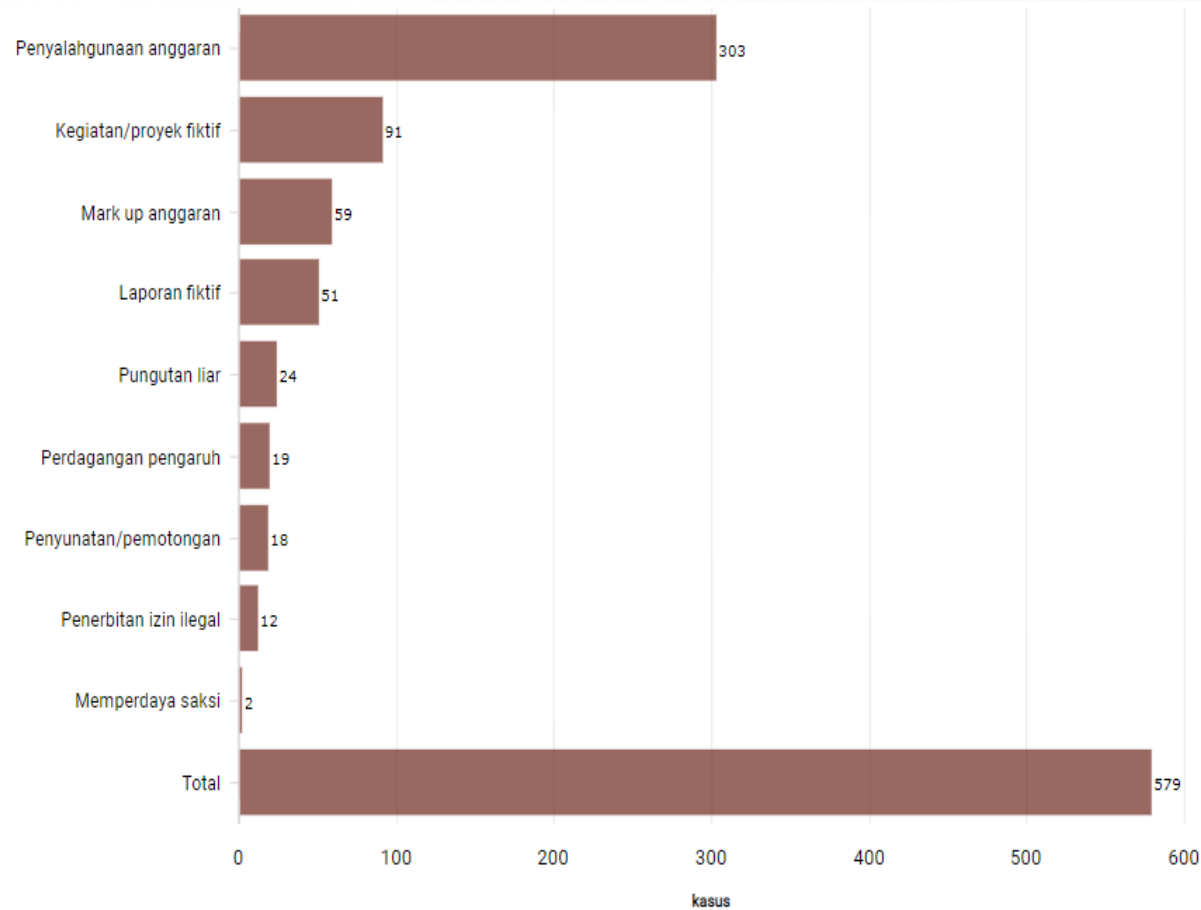
NO	FAKTOR	RANKING	SKORE
1	Pembatasan Kekuasaan Pemerintah	33/140	0.66
2	Absennya Korupsi	94/140	0.40
3	Pemerintahan Terbuka	56/140	0.55
4	Pemenuhan Hak-hak Dasar	87/140	0.50
5	Keamanan Dan Ketertiban	78/140	0.71
6	Penegakan Aturan	47/140	0.57
7	Civil Justice	93/140	0.47
8	Criminal Justice	88/140	0.39

# KASUS KORUPSI INDONESIA

## Jumlah Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Wilayah (2004-2022)



## Modus Operandi Kasus Korupsi (2022)



# MONEY LAUNDERING

- ❑ Most crimes are committed for money or some type of financial gain. Therefore, individuals committing crime need to engage in transactions with these funds to disguise the fact that the funds are derived from illegal activity. The fund must be laundered if they are to be secured and enjoyed. If there are transactions with these proceeds, this constitutes money laundering.
- ❑ Upaya mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas/kegiatan usaha yang sah.
- ❑ Merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional (*organized crime*) dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan SEKTOR JASA KEUANGAN, maupun NON SEKTOR JASA KEUANGAN.
- ❑ Money Laundering memiliki dampak terhadap Asset Tracing (asset hasil kejahatan atas nama pelaku minim, asset sulit dilacak, asset sudah berpindah tangan kepada pihak lain, asset pindah ke yurisdiksi lain, atau asset dikendalikan atau dikelola pihak lain).

# PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (FOLLOW THE MONEY)

COLLECTING/RECEIVING



ANALYZING



DISSEMINATING

JENIS LAPORAN; Pasal 23 UU No. 8 Th 2010

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai
3. Laporan Transaksi
4. Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas

PIHAK PELAPOR; Pasal 17 UU No. 8 Thn 2010 dan PP No. 43 Thn 2015, serta PP No. 61 Tahun 2021.

**1. PENYEDIA JASA KEUANGAN**

Bank, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi, Dana pensiun Lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, custodian, wali amanat, perposan, PVA, Penyelenggara APMK, Penyelenggara e-money/e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara usaha pengiriman uang.

**2. PENYEDIA JASA KEUANGAN (PP No. 61 Th 2021-perubahan PP No. 43 Th 2015)**

Perusahaan modal Ventura, Perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi

**2. PENYEDIA BARANG DAN JASA**

Perusahaan property/agen property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang

**3. PROFESI**

Advokat, notaris, ppat, akuntan, akuntan public dan perencana keuangan

- LAPORAN HASIL ANALISIS
- LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
- INFORMASI

TK BERINDIKASI TP

APARAT PENEGAK HUKUM DAN PIHAK LAIN



# PENERIMAAN LAPORAN PPATK

Jenis Laporan	Tahun 2021	Tahun 2022	2023 (Jan-April)
LTKM	79,543	90,742	39,366
LTKL	21,705,637	24,211,176	9,418,863
LTPBJ	47,587	90,799	33,490
LTKT	2,766,324	3,431,107	1,096,812
LPUT	18	9,655	3,535
<b>TOTAL</b>	<b>24,599,109</b>	<b>27,833,479</b>	<b>10,592,236</b>

**TOTAL LAPORAN APRIL 2023:  
2.298.730**

PASAL 1 ANGKA 5 –UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU:

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU ini
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

- LTKM: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- LTKL: Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri
- LTPBJ: Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa
- LTKT: Laporan Transaksi Keuangan Tunai
- LPUT: Laporan Pembawaan Uang Tunai

**JUMLAH INDIKASI TINDAK PIDANA ASAL PER BULAN PADA LTKM**

<b>TINDAK PIDANA ASAL</b>	<b>JANUARI</b>	<b>FEBRUARI</b>	<b>MARET</b>	<b>APRIL</b>
Cukai	1	2	6	4
Di Bidang Kehutanan	14	4	5	3
Di bidang Kelautan dan Perikanan	2	2	2	2
Di Bidang Lingkungan Hidup	58	34	43	38
Di Bidang Pasar Modal	73	65	97	75
Di Bidang Perasuransian	118	61	217	61
Di Bidang Perbankan	460	399	543	405
Di Bidang Perpajakan	789	843	973	479
Kepabeanan	8	12	11	4
<b>Korupsi</b>	<b>421</b>	<b>534</b>	<b>674</b>	<b>408</b>
Narkotika	175	164	179	124
Pemalsuan Uang	1		5	
Penculikan			2	
Pencurian	8	4	16	2
Penggelapan	201	8.829	3.767	3.225
Penipuan	1.563	1.575	1.668	1.253
Penyeludupan Migran				
Penyeludupan Tenaga Kerja			2	3
Penyeludupan Barang				
Penyuapan	110	70	160	159
Perdagangan Orang	14	7	6	4
Perdagangan Senjata Gelap				1
Perjudian	916	831	851	428
Psikotropika	4	4	1	
Terorisme	51	44	56	3
TP Lain yang diancam pidana 4 Th atau lebih	1.175	1.223	1.702	830
<b>TOTAL</b>	<b>6.162</b>	<b>14.707</b>	<b>10.986</b>	<b>7.511</b>

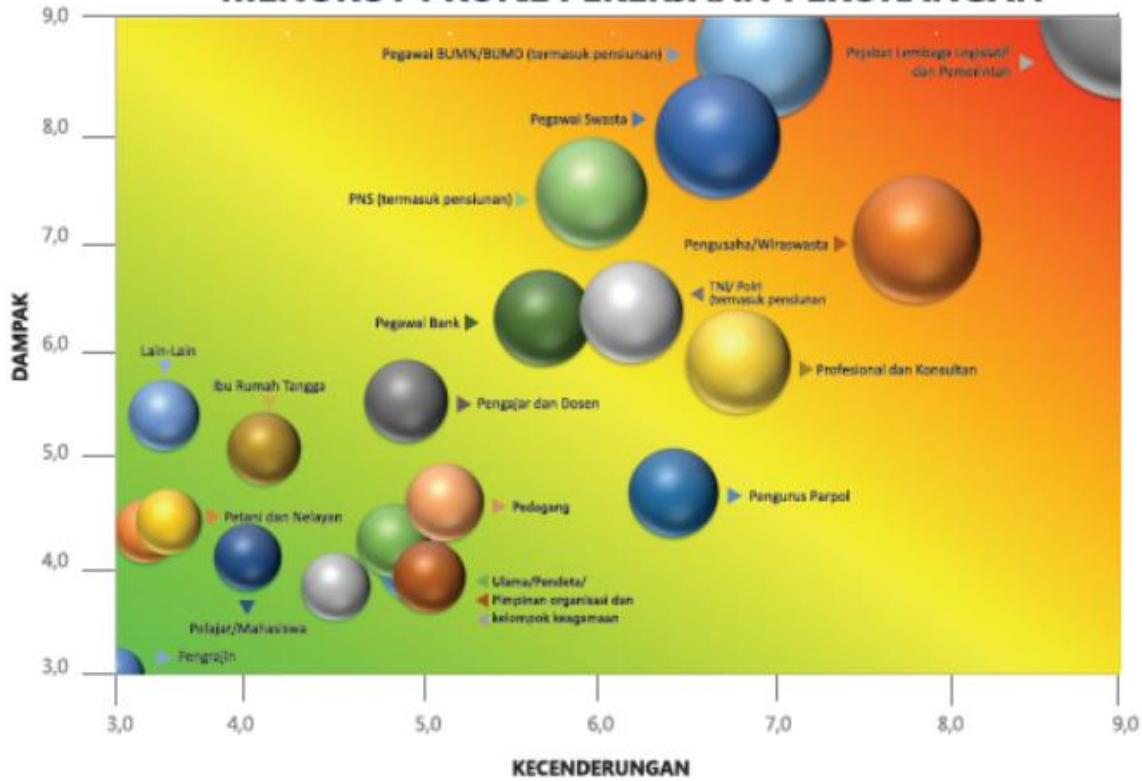
# Jumlah HASIL AANALISIS berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2023 (sd. April 2023)



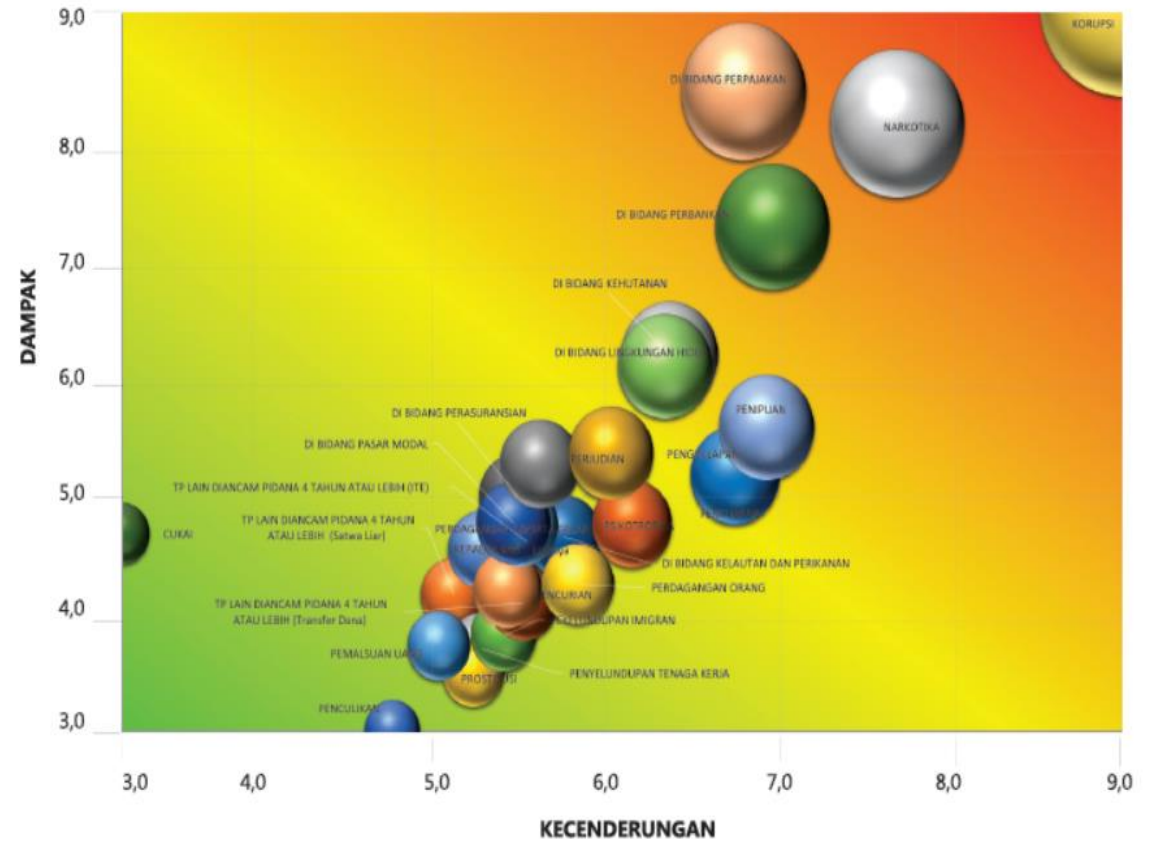
# HASIL NATIONAL RISK ASSESSMENT 2021

Risiko tertinggi TPPU Domestik Menurut Jenis Tindak Pidana Asal bersumber dari hasil tindak pidana korupsi dan narkoba. Selanjutnya, terdapat tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan, tindak pidana kehutanan, penipuan dan lingkungan hidup teridentifikasi sebagai risiko TPPU pada kategori menengah.

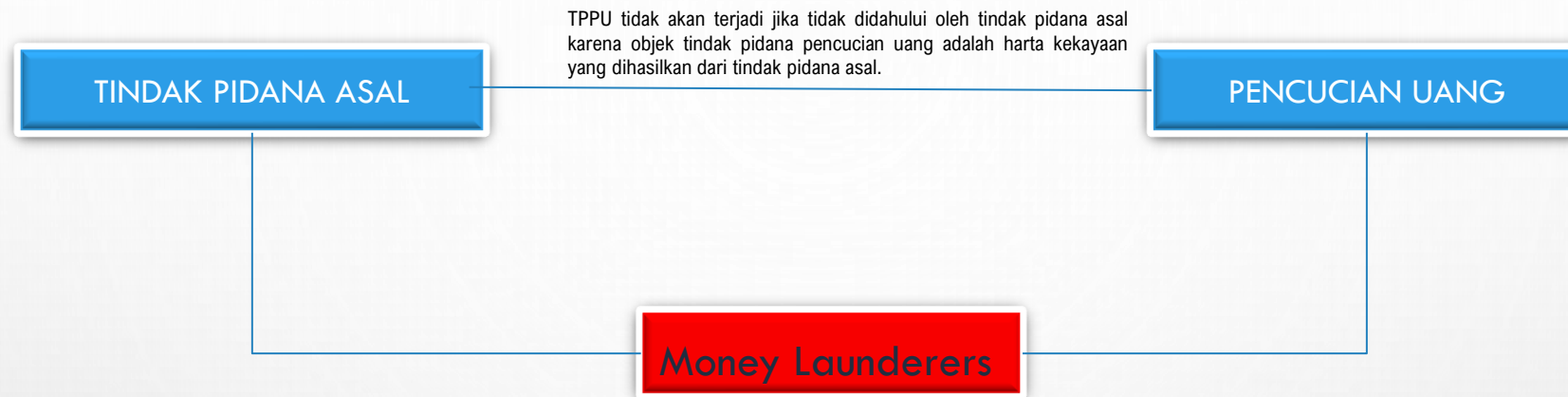
### PETA RISIKO TPPU MENURUT PROFIL PEKERJAAN PERORANGAN



### PETA RISIKO TPPU DOMESTIK MENURUT JENIS TPA

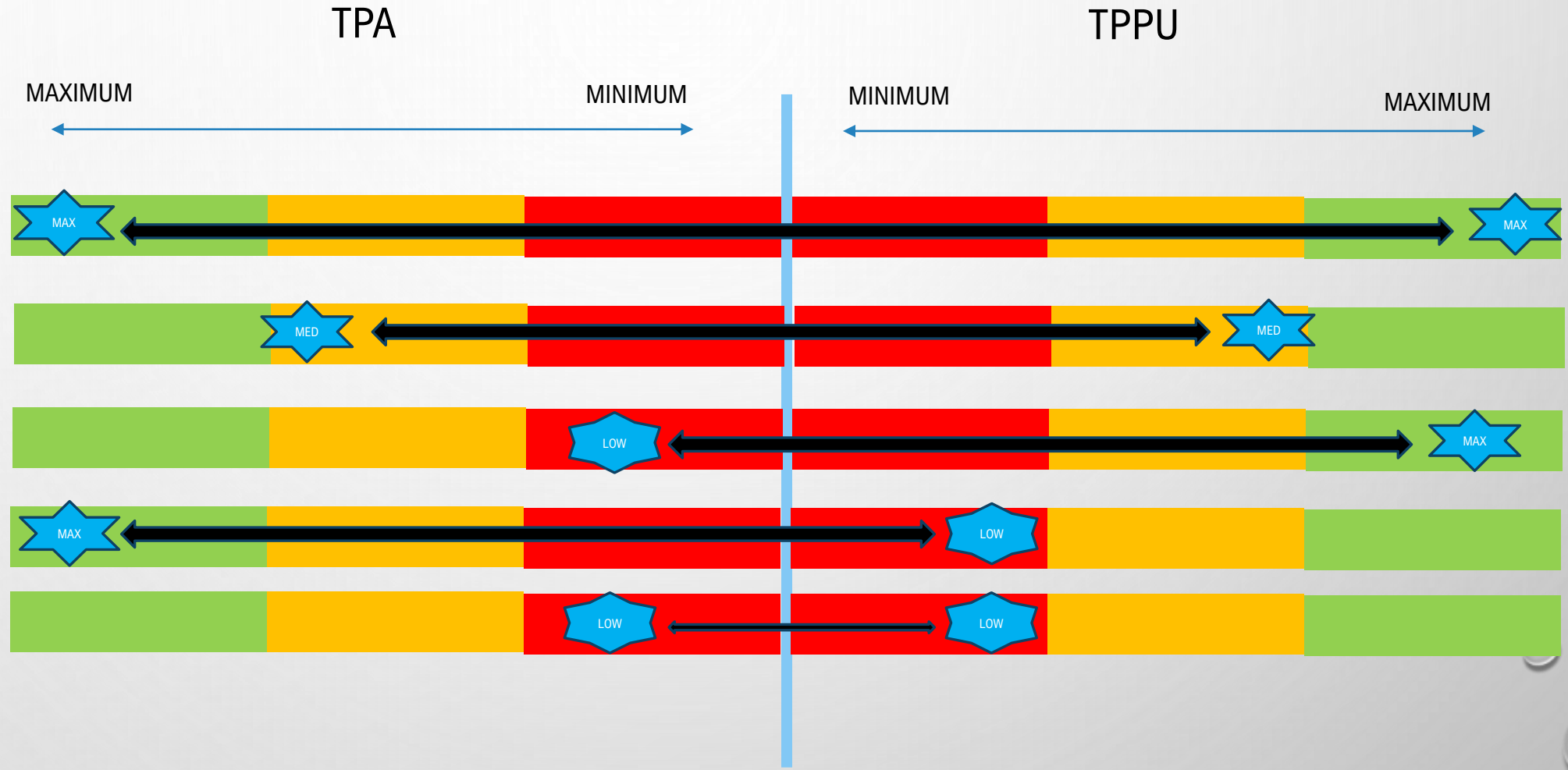


## HUBUNGAN TINDAK PIDANA ASAL DENGAN PENCUCIAN UANG



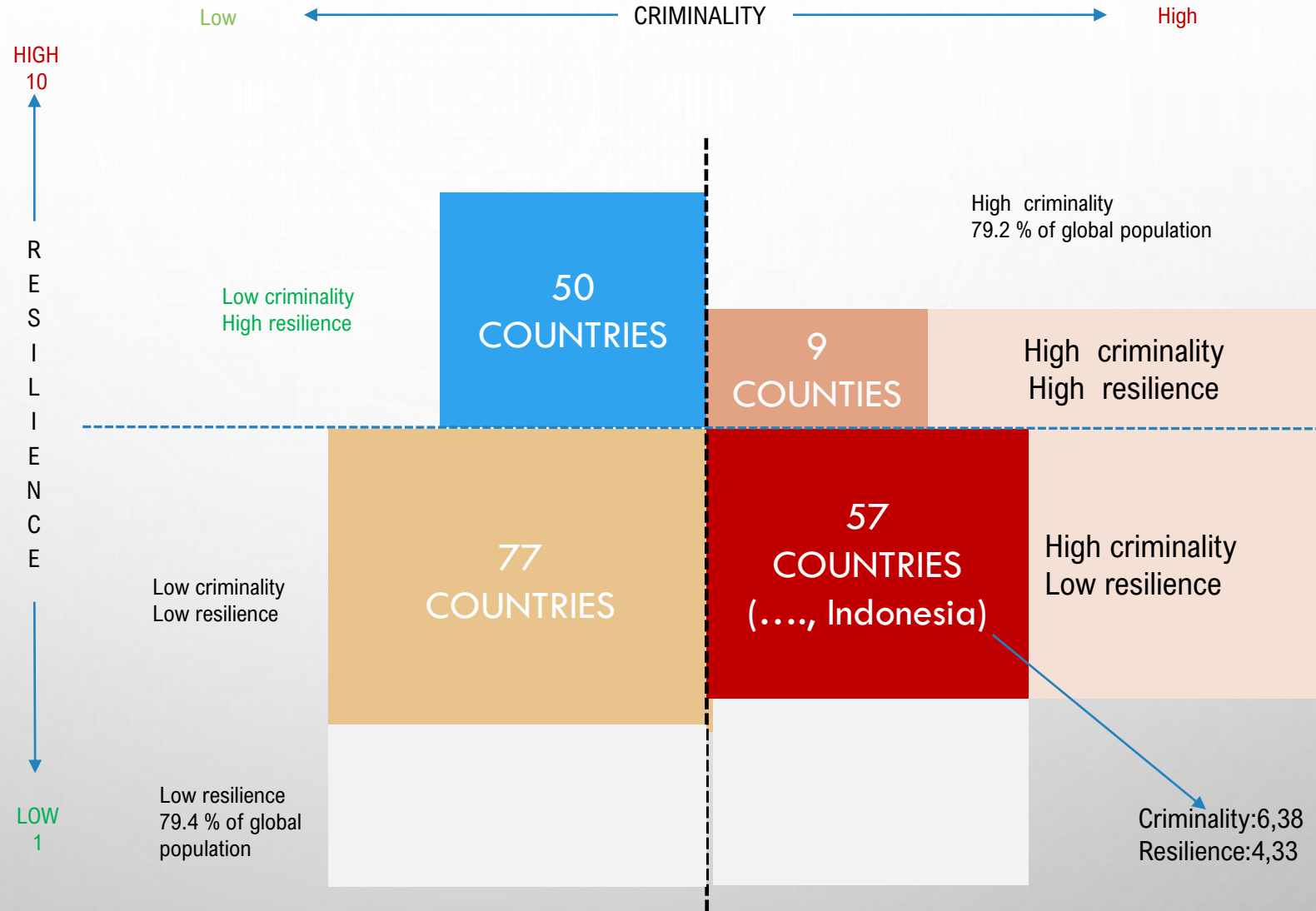
1. Those that commit predicate offenses and launder their own money;
2. Those that commit predicate offenses, launder their own money, and also launder the proceeds of other criminals;
3. Those in business that do not commit predicate offenses, but launder the proceeds of others' crimes as part of their otherwise legitimate business;
4. Those who launder the proceeds of others' crimes as their only business activity.

# PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



# CRIMINALITY VS RESILIENCE

- ❑ GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX 2021 (GLOBAL INITIATIVE AGAINST INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME). The Global Organized Crime Index is the first tool of its kind designed to assess level organized crime and resilience to organized criminal activity
- ❑ RESILIENCE as the ability to withstand and disrupt organized criminal activities as whole, rather than individual market through political, economic, legal and social measures. Resilience refers to countries' measures taken by both state and non state actors
- ❑ INDIKATOR RESILIENCE ADA 12 YAITU:
  1. Political leadership and governance (4,0)
  2. Government transparency and accountability (3,5)
  3. International cooperation (5,5)
  4. National policies and law (5,0)
  5. Judicial system and detention (3,5)
  6. Law enforcement (4,0)
  7. Territorial integrity (4,0)
  8. Anti Money Laundering (4,5)
  9. Economic regulatory capacity (4,5)
  10. Victim and witness support (5,0)
  11. Prevention (4,5)
  12. Non state actors (4,0)



The Global Organized Crime Index is the first tool of its kind designed to assess level organized crime and resilience to organized criminal activity. Its includes in its rankings all the UN member state-193 countries.

Beberapa hasil riset ini menunjukkan:

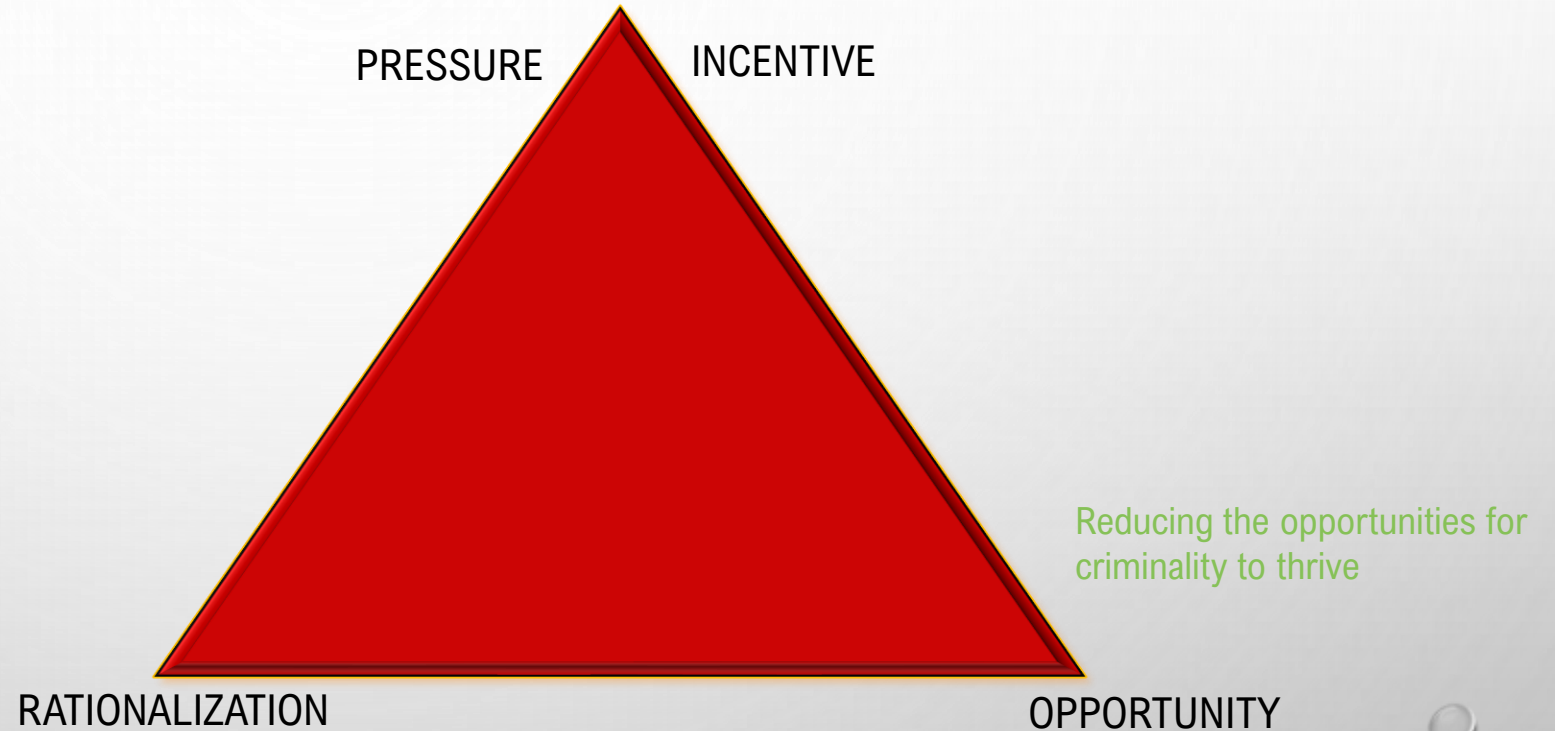
1. 80 % populasi dunia berada pada high level criminality
2. State officials and clientelist networks who hold influence over state authorities are now the most dominant brokers of organized crime and not cartel leader or mafia bosses
3. Criminal networks and their impact have spread across the globe in the last two decades, driven by geopolitical, economic and technological forces.
4. Criminality berdasarkan benua: Asia (5,30), Africa (5,17), Americas (5,06), Europe (4,48, dan Oceania (3,07).
5. Criminal Actor Score , Asia: Mafia style groups (4,34), criminal network (5,62), State-embedded actors (6,46) dan foreign actors (5,12).



# Why People Commit Fraud dan Apa Yang Harus Dilakukan?

## Fraud Triangle

- ❑ Mendorong penegakan hukum yang menciptakan efek jera baik bagi pelaku maupun calon pelaku.
- ❑ Mendorong Penegak Hukum untuk menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi
- ❑ Mengoptimalkan recovery asset dari kerugian tindak pidana korupsi (asset tracing dilakukan sejak tahap Penyelidikan/Penyidikan)
- ❑ Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penangan Tindak Pidana Korupsi
- ❑ Mendorong fungsi pengawasan atau keterlibatan publik/masyarakat sebagai mekanisme check and balance agar tidak terjadi abuse of power oleh penegak hukum
- ❑ Mendorong transparansi penanganan kasus oleh penegak hukum





**TERIMA KASIH**

**CEGAH DAN BERANTAS TPPU  
MENUJU INDONESIA BEBAS DARI  
AKTIVITAS PENCUCIAN UANG**